ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT PENGUNGKAPAN WAJIB LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA

SKRIPSI

Oleh:

Nama: Rizma Yunisa Widanti

No Mahasiswa : 15312407

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2019

ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT PENGUNGKAPAN WAJIB LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi UII.

Oleh:

Nama : Rizma Yunisa Widanti

No Mahasiswa : 15312407

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2019

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

"Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sangsi apapun sesuai peraturan yang berlaku."

Yogyakarta,

Penulis,

(Rizma Yunisa Widanti)

ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT PENGUNGKAPAN WAJIB LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan oleh :

Nama : Rizma Yunisa Widanti

No Mahasiswa : 15312407

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 2-8-2019

Dosen Pembimbing

(Johan Arifin,, S.E.,M.Si.,Ph.D.,CFrA)

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT PENGUNGKAPAN WAJIB LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA

Disusun Oleh : **RIZMA YUNISA WIDANTI**

Nomor Mahasiswa : **15312407**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Rabu, tanggal: 11 September 2019

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Johan Arifin, SE., M.Si., Ph.D. .....

Penguji : Arif Rahman, SIP., SE., M.Com.,Ph.D. .....

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia

Jaka Sriyana, SE., M.Si, Ph.D.

MOTTO

"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka, apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap."

(QS Al-Insyirah: 6-8)

"Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat."

(QS Al Baqarah: 214)

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."

(QS Al Baqarah: 286)

"Dan Allah bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan"

(QS Al Hadid: 4)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini akan saya persembahkan untuk :

Kedua orang tua tercinta Bapak dan Ibu yang senantiasa mengiringi di setiap langkahku dengan doa, selalu memberikan semangat, motivasi dan kasih sayang yang tak terhingga. Semoga ini menjadi awal dari kesuksesan Riris nantinya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirobbil'aalamiin, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat, dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan karya skripsi dengan judul "**Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia**" Penyusunan skripsi ini ditulis untuk melengkapi salah satu syarat akademis untuk memperoleh gelar sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari doa, bimbingan, dorongan, dan bantuan baik materi maupun non materi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan karunia-Nya dan petunjuk serta melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Nabi Agung Muhammad SAW beserta para sahabat yang selalu menjadi teladan dalam perjalanan hidup.
3. Kedua orang tua Bapak Hari Widiyanto dan Ibu Syaida yang selalu memberikan dukungan, motivasi, saran, ide, dan nasihatnya. Terimakasih yang tak terhingga untuk segala perjuangan dan doa Bapak Ibu.

4. Bapak Jaka Sriyana, S.E., M.Si., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., CFrA selaku Ketua Jurusan Akuntasi dan selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan bimbingan, nasihat, saran, dan inspirasi terbaiknya dalam membantu penulisan skripsi ini.
6. Bapak Mahmudi, S.E., M.Si., Ak. CA.MCA., Dr. selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
7. Seluruh Dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis.
8. Seluruh Karyawan Tata Usaha Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia yang telah membantu kelancaran studi penulis selama ini.
9. Adik dari penulis Adrian Novrizal Hilmi dan Keila Raesya Nuha terimakasih untuk segala semangat dan dukungannya.
10. Tante Imha, Om agus, Tante Lisa, Om Budi, Om Riski, Tante Ditha, dek Reza, dek Rafa, dek Qia terimakasih untuk hiburan dan gangguannya ketika dirumah.
11. Aprines Hersusanda R, Linda Marcella, Zhafira Syarafina, Isnaini Nur H sahabat seperjuangan dari masa kanakk-kanak hingga saat ini. Terimakasih atas segala dukungan, semangat, dan doanya serta yang selalu ada buat penulis untuk kondisi apapun.

12. Nasrul Hasan S yang selalu menemani dan sabar ketika penulis membutuhkan bantuan. Terimakasih selalu memberikan semangat dan doanya serta selalu ada buat penulis untuk berkeluh kesah.
13. My luv genk Pinky: Dina Fauzia, Erisha Grasela, Astri Dewi Puspa, Hasina Tazkiya, Fadilla Armelita, Nicky Hardita teman sejak berat badan saya masih 43kg sampai sekarang entah berapa penulis tidak ingin menyebutkan. Terima kasih sudah menjadi teman yang memiliki sifat konsumtif sehingga penulis menjadi bahagia.
14. Sahabat Sop Ayam: Bella, Siti, Titi, Dini, Tyas, Febi, Rindang, Dayat, Rorry, Rayhan, Nova sahabat sejak awal masuk kuliah yang selalu memberikan semangat dan doanya serta tempat berkeluh kesah penulis dan menjadi pemberi solusi terbaik.
15. Teman grup "grup isine limbad kabeh" : Lina, Intan, Dian, Bagus, Fansed, Hanif, Menot, Bayek yang telah menjadi teman sejak SMA hingga sekarang. Terimakasih atas obrolan yang tidak penting yang telah diberikan dan doa serta semangatnya.
16. Teman teman mahasiswa akuntansi 2015 yang hampir setiap senin dan kamis bertemu untuk bimbingan konsultasi dengan dosen yang sama. Terimakasih gaes curhatannya, suka dan duka setelah keluar ruangan, bantuan dan semangatnya untuk selama ini.
17. Teman-teman OCB Kelas J atas segala doanya dan dukungannya.
18. Teman-teman KKN angakatan 58 unit 23 Dusun Karangwungu, Karangdowo Klaten : Ani, Rima, Lutfhi, Reza, Deka, Mas Irfan.

Terimakasih atas pertemuan, pelajaran, pengalaman, dan kebersamaanya selama hidup satu bulan bersama.

19. Teman-teman Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia khususnya angkatan 2015 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
20. Semua pihak terkait yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan memberikan dukungan baik materi maupun non materi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran kearah perbaikan sangat diperlukan. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta,

Penulis,

Rizma Yunisa Widanti

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i
HALAMAN JUDUL ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME ..... **Error! Bookmark not defined.**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **Error! Bookmark not defined.**
MOTTO v
HALAMAN PERSEMBAHAN vii
KATA PENGANTAR viii
DAFTAR ISI xii
ABSTRAK xv
ABSTRACT xv
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1.1. LATAR BELAKANG MASALAH 1
1.2. RUMUSAN MASALAH 5
1.3. TUJUAN PENELITIAN 6
1.4. MANFAAT PENELITIAN 6
1.5. SISTEMATIKA PENELITIAN 7
BAB II 8
KAJIAN PUSTAKA 8
2.1. Landasan Teori 8
2.1.1 Pengungkapan Informasi dalam Laporan Keuangan 8
2.2. Teori Agensi 12
2.3. Teori Institusional 14
2.4. PENELITIAN TERDAHULU 15
2.4.1. Jumlah Anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) 18
2.4.2. Jumlah OPD 20
2.4.3. Pendidikan Terakhir Kepala Daerah 21
2.4.4. Luas Wilayah 22

2.5. Kerangka Penelitian 23
2.6. HIPOTESIS PENELITIAN 24
2.6.1 Pengaruh Jumlah DPRD Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 24
2.6.2 Pengaruh Jumlah OPD Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 25
2.6.3 Latar belakang pendidikan Kepala Daerah Berpengaruh Terhadap Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi 26
2.6.4 Luas Wilayah Berpengaruh Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi 28
BAB III 30
METODE PENELITIAN 30
3.1. POPULASI DAN SAMPEL PENELITIAN 30
3.2. METODE PENGUMPULAN DATA 31
3.3. DEFINISI DAN PENGUKURAN VARIABEL PENELITIAN 31
3.3.1. Variabel Dependen (Y) 31
3.3.2. Variabel Independent (X) 33
3.3.3. Variabel Kontrol 36
3.4. Metode Analisis Data 37
3.4.1. Statistik Deskriptif 37
3.4.2. Uji Asumsi Klasik 38
3.4.3. Analisis Regresi Berganda 39
3.4.4. Uji Koefisien Determinasi 40
3.4.5. Uji Hipotesis 40
BAB 4 42
ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 42
4.1. ANALISIS STATISTIK DESKRIPTIF 42
4.2. UJI ASUMSI KLASIK 45
4.2.1. Uji Normalitas 45
4.2.2. Uji Multikolinearitas 46
4.2.3. Uji Heteroskedastisitas 48
4.3. ANALISIS REGRESI LINIER BERGANDA 49
4.4. UJI KOEFISIEN DETERMINASI 52
4.5. UJI HIPOTESIS 52
4.6. PEMBAHASAN 55

4.6.1. Pengaruh Jumlah Anggota DPRD terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib LKPD 55
4.6.2. Pengaruh Jumlah OPD terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib LKPD 56
4.6.3. Pengaruh Pendidikan Terakhir Kepala Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib LKPD 58
4.6.4. Pengaruh Luas Wilayah terhadap Tingkat Pengungkapan wajib LKPD 59
BAB V 62
KESIMPULAN DAN SARAN 62
5.1. KESIMPULAN 62
5.2. SARAN 63
LAMPIRAN 67
LAMPIRAN 1 68
LAMPIRAN 2 79
LAMPIRAN 3 82
LAMPIRAN 4 85
LAMPIRAN 5 88
LAMPIRAN 6 91
LAMPIRAN 7 94
LAMPIRAN 8 97
LAMPIRAN 9 100

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Populasi dari penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Indonesia dengan sampel 97 Kabupaten/Kota di Indonesia dengan menggunakan metode *purposive sampling.* Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan program SPSS. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa terdapat pengaruh luas wilayah terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah secara parsial. Tidak dapat pengaruh antara jumlah anggota DPRD, jumlah OPD, luas wilayah dan pendidikan terakhir kepala daerah terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah secara parsial.

Kata kunci : jumlah anggota DPRD, jumlah OPD, pendidikan terakhir kepala daerah, luas wilayah tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah.

ABSTRACT

This study aims to determine the factors that influence the level of mandatory disclosure of financial statements of local governments in Indonesia. The population of this study is the regency / city in Indonesia with a sample of 97 regencies / cities in Indonesia using the purposive sampling method. The analytical method used in this study uses multiple linear regression analysis with the SPSS program. The results of this study indicate that there is an influence of the area on the level of mandatory disclosure of regional government financial statements partially. There can be no influence between the number of DPRDs, the number of SKPDs and the latest education of regional heads to the partial level of mandatory disclosure of local government financial statements.

Keywords: number of DPRD, number of OPD, education of the last regional head, level of mandatory disclosure of local government financial statements.

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dibahas beberapa alasan yang menjadi latar belakang penelitian ini dilakukan yaitu mengenai faktor analisis yang mempengaruhi tingkat pengungkapan wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Rumusan masalah sebagai fokus utama penelitian, manfaat dan tujuan penelitian serta sistematika penelitian juga diuraikan dalam bab ini. Berikut penjelasan secara rinci mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat dan tujuan penelitian serta sistematika penelitian.

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good goverment governance),* pemerintah akan terus melakukan usaha-usaha yang digunakan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Ada beberapa bidang yang digunakan dalam usaha pengelolaan keuangan negara yaitu bidang peraturan perundang-undangan, kelembagaan sistem, dan peningkatan sumber daya manusia (SDM). Di bidang peraturan perundang-undangan, pemerintah dengan persetujuan DPR-RI telah menetapkan satu paket undang-undang di bidang keuangan negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. Ketiga undang-undang tersebut menjadi

dasar bagi institusi negara dalam mengubah pola administrasi keuangan (*financial administration*) dan menjadi pengelolaan keuangan (*financial management*).

Otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangannya agar dapar tercipta pemerintahan yang bersih. Usaha dalam mencapai tujuan tersebut dengan dilakukannya kewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Laporan keuangan merupakan suatu proses dari pengumpulan, pengolahan, dan pengkomunikasian informasi yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan (Mardiasmo, 2009). Laporan keuangan merupakan sebuah mekanisme pertanggungjawaban dan bisa dijadikan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan. Maka dari itu, laporan keuangan harus disajikan dengan jelas dan tidak mengakibatkan kesalahpahaman bagi para pembaca laporan. Karena laporan keuangan dibuat tidak hanya semata-mata untuk memenuhi peraturan yang berlaku saja, tetapi juga merupakan sebuah informasi yang dapat dipahami dan dapat digunakan untuk membantu pengguna laporan keuangan dalam membuat sebuah keputusan. Laporan keuangan yang telah disusun sesuai dengan SAP yang berlaku kemudian di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk kemudian dapat disampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat.

Menurut Na'im dan Rakhman (2000), pengungkapan dalam laporan keuangan dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu pengungkapan wajib (*Mandatory Disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*Voluntary Disclosure*). Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan minimun yang disyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku sedangkan pengungkapan sukarela merupakan pilihan bebas dari manajemen perusahaan/entitas pelaporan untuk memberikan informasi akuntasi dan informasi lainnya yang dipandang relevan untuk keputusan oleh para pemakai laporan keuangan tersebut.

Penyajian dan pengungkapan laporan keuangan disusun berdasarkan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) dengan menyatakan bahwa entitas pelapor mengungkapkan isi infromasi tentang ketaatan terhadap anggaran, dalam paragraf-paragraf selanjutnya menjelaskan tentang pentingnya pengungkapan dari semua informasi keuangan yang dibutuhkan bagi pengguna. Pemenuhan atas pengungkapan juga berguna dan memudahkan pengguna dalam memahami sebuah laporan keuangan. Maka, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna laporan dan dapat digunakan dalam membuat keputusan-keputusan ekonomi yang ditunjukkan dalam bentuk pertanggungjawaban (*stewardship*) manajemen atas penggunaan sumber-sumber yang dipercayakan dapat tercapai.

Selain pengawasan fungsional oleh kepala daerah, pengawasan legislatif sebagai bentuk mekanisme internal juga memegang peranan penting dalam peningkatan kinerja pemerintah daerah. Mekanisme yang terjadi di internal ini dilakukan melalui lembaga internal yang melakukan pengawasan dan

pemantauan atas setiap keputusan formal oleh pemerintah daerah. Lembaga internal yang melakukan fungsi ini adalah DPRD menurut Undang – Undang No. 32 tahun 2004 DPRD sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintah daerah berperan sebagai mitra kerja kepada daerah dan melakukan fungsi penganggaran, pengawasan, dan legislasi. Peraturan ini menjelaskan bahwa DPRD merupakan representasi rakyat dalam melakukan fungsi *monitoring* terhadap pengambilan keputusan formal oleh pemerintah daerah. Implikasinya, DPRD dintuntut untuk melaksanakan fungsi pengawasan dengan baik terhadap setiap kebijakan yang dilaksakan oleh kepala daerah. Salah satu indikator efektivitas pengawasan ini adalah ukuran legislatif pada suatu daerah tersebut. Saat ini banyak fenomena di Indonesia yang mantan dan anggota legislatif yang divonis bersalah oleh pengadilan karena menyalahgunakan APBD. Kemungkinan hal ini terjadi karena peran legislatif yang sangat besar dalam proses penganggaran, terutama pada tahap perencanaan atau perumusan kebijakan anggaran dan pengesahan anggaran. Kondisi *powerfull* yang dimiliki legislatif menyebabkan tekanan kepada eksekutif menjadi semakin besar.

Beberapa penelitian sebelumnya yang melakukan penelitian tentang diferensiasi fungsional menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Penelitian yang dilakukan oleh Girsang dan Yuyetta (2015), Maulana dan Handayani (2015), Setyaningrum dan Syafitri (2012) mengatakan bahwa ada pengaruh positif namun tidak signifikan berbeda dengan penelitian Setyowati (2016) yang menunjukkan bahwa julah OPD berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD.

Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah menggambarkan jumlah urusan yang menjadi prioritas dari suatu pemerintah daerah untuk membangun daerah tersebut. Apabila semakin besar urusan suatu daerah maka semakin besar pula tingkat pengungkapan yang harus dilakukan. Sama juga seperti umur pemerintah yang dapat diartikan sebagai berapa lama pemerintahan tersebut sudah berlangsung. Semakin lama umur suatu pemerintahan juga akan mempengaruhi kualitas dari pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan pengalaman pada pemerintahan tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Khasanah dan Rahardjo (2014) mengatakan bahwa jumlah OPD berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD.

Dengan adanya pernyataan di atas, penulis akan melakukan penelitian dengan mempertimbangkan penelitian-penelitian sebelumnya yang meneliti tentang pengungkapan laporan keuangan pada pemerintah daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, penulis bermaksud untuk melanjutkan penelitian-penelitian sebelumnya terkait dengan pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia dengan judul "**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGUNGKAPAN WAJIB PADA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA**"

1.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan dengan apakah jumlah anggota DPRD, Jumlah OPD, Pendidikan terakhir Kepala Daerah, dan Luas Wilayah

berpengaruh dengan tingkat pengungkapan wajib pada laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia.

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan dari perumusan masalah yang diuraikan di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui apakah jumlah anggota DPRD, jumlah OPD, Pendidikan terakhir Kepala Daerah dan Luas Daerah berpengaruh terhadap pengungkapan wajib pada laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia.

1.4. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang diharapkan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dapat memberikan masukan berguna yang antara lain, yaitu:

1. Bagi pemerintah pusat selaku pengguna Standar Akuntansi Pemerintahan, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan.
2. Bagi pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai pengguna Standar Akuntansi Pemerintahan, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan dalam penyediaan sumber daya manysia yang menguasai ilmu akuntansi agar dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku.

1.5. SISTEMATIKA PENELITIAN

Untuk mempermudah dan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai isi skripsi ini, pembahasan dilakukan secara komprehensif dan sistematik meliputi :

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Kajian Pustaka

Pada bab ini berisi uraian tentang pejelasan mengenai teori-teori yang akan melandasi penelitian, variabel penelitian, hasil penelitian terdahulu, dan penarikan hipotesis.

BAB III Metode Penelitian

Pada bab ini berisi uraian tentang jumlah sampel yang diteliti, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis yang digunakan untuk menguji kebenaran penelitian.

BAB IV Analisis Data dan Pembahasan

Pada bab ini berisi uraian tentang analisis data, pengujian dan penjelasan atas hipotesis yang telah dibuat, dan pembahasan dari hasil analisis yang dikatkan dengan penelitian terdahulu.

BAB V Simpulan dan Saran

Pada bab ini berisi tentang uraian mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan saran bagi penelitian selanjutnya dan pihak yang berkepentingan lainnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1 Pengungkapan Informasi dalam Laporan Keuangan

Secara teknis, pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi yaitu penyajian informasi dalam bentuk seperangkat penuh laporan keuangan (Suwardjono, 2006). Suwardjono juga menjelaskan tentang pengungkapan yang sering dimaknai sebagai penyediaan informasi lebih dari apa yang disampaikan dalam bentuk laporan keuangan formal. Karena pengungkapan dituntut untuk lebih dari sekedar pelaporan keuangan tetapi meliputi penyampaian informasi kualitatif.

Menurut Chairiri dan Ghozali (2003: 247), pengungkapan (*disclosure*) dapat dikelompokkan menjadi dua macam, di bawah ini.

1. Pengungkapan Wajib (*mandatory disclosure*)

   Pengungkapan wajib merupakan penungkapan tentang informasi yang diharuskan oleh peraturan yang telah ditetapkan oleh badan otoriter. Untuk sektor publik di Indonesia, pengungkapan informasi dalam laporan keuangan pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

2. Pengungkapan Sukarela (*voluntary disclosure*)

Pengungkapan sukarela merupakan informasi yang tidak diwajibkan oleh suatu peraturan yang berlaku, tetapi diungkapkan oleh entitas karena dianggap relevan dengan kebutuhan pemakai.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, laporan keuangan disusun dengan maksud untuk menyajikan tentang posisi keuangan yang relevan dan transaksi-transaksi yang terjadi dalam satu periode pelaporan. Untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintah dapat menggunakan laporan keuangan. Selain itu laporan keuangan juga bisa digunakan sebagai menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatanya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Komponen yang harus disajikan oleh Pemerintah Daerah di dalam laporan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran II yaitu:

1. Laporan Realisasi Anggaran

   Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyediakan informasi tentang realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran

   Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih laporan yang secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut: a) Saldo Anggaran Lebih awal; b) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih; c) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan; d) Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya; e) Lain-lain; dan f) Saldo Anggaran Lebih Akhir.

3. Neraca

   Neraca menggambarkan posisi keuangan dari suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Necara berisi tentang sekurang-kurangnya pos-pos seperti, kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang pajak dan bukan pajak, persediaan, investasi jangka panjang, aset tetap, kewajiban jangka pendek, dan kewajiban jangka panjang, dan ekuitas dana.

4. Laporan Operasional

   Dalam laporan operasional menyajikan tentang ikhtisar sumber daya eknomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk kegiatan penyelenggataan pemerintahan dalam satu periode pelaporan tersebut. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa.

5. Laporan Perubahan Ekuitas

   Laporan Perubahan ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi tentang kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

6. Catatan Atas Laporan Keuangan

   Catatan atas Laporan keuangan meliputi penjelasan atau rincian dari angka yang muncul dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan infomasi lain yang diharuskan serta dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan yang wajar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku

Sesuai dengan SAP bahwa laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Pengguna laporan keuangan mendapatkan informasi yang dibutuhkan pada lembar muka laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan (CALK). CALK yang dinyatakan dalam Standar Akuntansi Pemerintah dibuat dengan maksud agar laporan keuangan mudah dipahami pembaca secara luas karena laporan keuangan mengandung informasi yang dapat berpotensi terjadi kesalahpahaman antara pembacanya. Dalam CALK menyajikan penjelasan atas laporan keuangan, penjelasan dan referensi pos-pos laporan, penyajian

informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh SAP hingga pengungkapan lain yang diperlukan untuk penyajian wajar.

2.2. Teori Agensi

Teori keagenan menjelaskan konflik yang terjadi dalam organisasi pada saat hubungan antar pihak berupa hubungn agen-prinsipal dalam (Gudono, 2012). Menurut Govindarajan dan Anthony (2001) bahwa hubungan agensi adalah ketika pada salah satu pihak (*principal*) menyewa pihak lain (agen) untuk melaksanakan suatu jasa dan dalam melakukan semua hal itu, menggunakan wewenang untuk membuat keutusan kepada agen tersebut.

Teori agensi dibangun sebagai upaya untuk memahami dan memecahkan masalah yang muncul manakala ada ketidaklengkapan informasi pada saat melakukan kontak antara *principal* (pemberi kerja) dengan agen (pelaksana kerja) (Gudono, 2012). Agen bisa dikatakan sebagai pengelola sehingga agen akan lebih tahu keadaan perusahaan dibandingkan prinsipal dan prinsipal juga tidak mengetahui seberapa besar usaha yang agen telah lakukan untuk perusahaan.

Hal yang bisa menjadi penyebab munculnya perbedaan informasi antara Pemerintah Daerah dengan legislatif dan publik adalah jika dihubungkan dengan teori keagenan pada sektor publik dijelaskan bahwa pemerintah daerah sebagai agen, jadi lebih mengetahui usaha yang telah dilakukannya dan lebih mengetahui keadaan keuangan pemerintah daerah dibandingkan legislatif maupun publik.

Pemerintah daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangan yang dijadikan sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah di tetapkan dan dilaksanakan.

Maulana (2015) teori keagenan tidak hanya diaplikasikan dalam sektor swasta yang berkiblat pada orientasi laba atau *profit oriented*. Pada sektor publik, *principal* diwakili oleh rakyat yang dalam hal ini dipresentatifkan dengan legislatif (DPRD) sedangkan *agent* dipresentatifkan dengan eksekutif (pemerintah). Dalam masalah keagenan yang terjadi pada pemerintahan, yaitu terjadi antara eksekutif dan legislatif dan antara legislatif dan publik. Dalam hubungan keagenan antara eksekutif dan legislatif, eksekutif yang sebagai agen dan legislatif sebagai prinsipal. Hubungan keterkaitan antara teori keagenan dengan penelitian ini adalah pada saat penyusunan APBD. Sebelum pengesahan APBD dilakukan, terlebih dahulu dibuat pengesahan, sebelumnya dibuat kesepakatan antara legislatif dan eksekutif mengenai Arah dan Kebijakan Umum (AKU) dan prioritas anggaran, yang menjadi pedoman untuk penyusunan anggaran pendapatan dan anggaran belanja. Sebelum diserahkan kepada legislatif untuk dipelajari dan dibahas bersama sebelum ditetapkan sebagai peraturan daerah (Perda) eksekutif lebih dulu membuat rancangan APBD sesuai dengan AKU dan prioritas anggaran.

2.3. Teori Institusional

Falkman dan Tagesson (2008) dalam sebuah penelitian menyatakan bahwa teori institusional (*institutional theory*) dan teori keagenan (*agency theory)* merupakan dua teori yang bersifat komplementer untuk menyatakan tentang praktek pelaporan keuangan Pemerintah Daerah. Teori Institusional menyatakan bahwa organisasi merespon tekanan-tekanan dari konteks institusional mereka. Scott (2008) menjelaskan bahwa teori institusional dapat digunakan untuk menjelaskan tindakan dan pengambilan keputusan dalam organisasi publik. Respon yang dihasilkan dapat berupa adopsi praktek-praktek serta struktur yang dapat diterima secara sosial yang dapat dijadikan sebuah pilihan oleh organisasi yang tepat dalam rangka memperoleh legitimasi dari konteks institusional mereka. Adopsi praktek-praktek atau struktur dalam rangka memperoleh legitimasi tersebut dapat terjadi dalam organisasi melalui 3 mekanisme (disebut sebagai *isomorphism*) yaitu : (i) *coercive* (melalui tekanan dari organisasi lain yang mempunyai dampak pengaruh yang kuat sehingga organisasi yang merespon mempunyai dampak ketergantungan yang besar); (ii) *mimetic* (melalui peniruan terhadap organisasi lain yang telah sukses melakukan adopsi dan memperoleh legitimasi); dan (iii) *normative* (melalui peran dari suatu kelompok profesional yang memperjuangkan praktek adopsi yang seharusnya dilakukan).

Dalam hubungan dengan pemerintahan, pemerintah yang disebut sebagai legislatif atau DPRD mendapat tekanan dari organisasi lain untuk

memiliki dampak pengaruh dalam pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Teori koersif dalam teori institusional adalah tekanan eksternal yang diberikan oleh pemerintah, peraturan atau lembaga lain untuk mengadopsi struktur dan sistem maka peraturan dapat menyebabkan adanya pengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

2.4. PENELITIAN TERDAHULU

Tabel 2.1

Tabel Penelitian Terdahulu

	Nama Penelitan	**Judul Penelitian**	**Variabel Penelitian**	**Metode Analisis**	**Hasil Penelitian**
1	Puspita & Martani (2012)	Analisis Pengaruh Kinerja dan Karakteristik Pemda Terhadap Tingkat Pengungkapan dan Kualitas Informasi Dalam Website Pemda	PAD, tingkat ketergantungan, ukuran pemda, kompleksitas pemda	Regresi berganda	Tingkat keterantungan, ukuran pemda dan kompleksitas berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan, PAD dan belanja tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan
2	Setyaningrum & Syafitri (2012)	Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat	Ukuran Pemda, ukuran legislatif, umur administratif, kekayaan pemda, jumlah SKPD, latar	Regresi	Ukuran legslatif, umur administratif, kekayaan pemda berpengaruh positif. Intergovernmental revenue

		Pengungkapan Laporan Keuangan	belakang pendididikan kepala daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, intergovermental revenue		berpengaruh negatif. Ukuran Pemda, diferensiasi fungsional, latar belakang pendidikan kepala daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, dan pembiayaan utang dalam tidak berpengaruh signifikan
3	Khasanah & Rahardjo (2014)	Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas, Dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kekayaan daerah (PAD), Tingkat ketergantungan daerah, Total aset, Umur pemerintah daerah, jumlah SKPD, Ukuran legislatif, Jumlah temuan audit	Regresi data panel	PAD dan tingkat ketergantungan tidak berpengaruh signifikan. Total aset berpengaruh positif dan signifikan. Umur pemerintah daerah, Ukuran legislatif dan temuan audit berpengaruh negatif tidak signifikan. Jumlah SKPD berpengaruh negatif dan signifikan.
4	Lesmana (2010)	Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap	Umur Pemerintah Daerah, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Kewajiban,	Regresi berganda	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa umur pemerintah daerah dan rasio kemandirian

		Tingkat Pengungkapan Wajib di Indonesia	Pendapatan Transfer, Jumlah SKPD		keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan tehadap pengungkapan wajib. Sedangkan ukuran pemerintah daerah, kewajiban, pendapatan transfer, dan jumlah SKPD tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah provinsi.
5	Hilmi (2012)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Penduduk, Tingkat Penyimpangan, Tingkat Ketergantungan, Total Aset, Jumlah SKPD, Temuan Audit		Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa variabel kekayaan daerah, jumlah penduduk, dan tingkat penyimpangan berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi. Variabel lainnya yaitu

					tingkat ketergantungan, total aset, jumlah SKPD, dan temuan audit tidak berpengaruh pada tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi.

2.4.1. Jumlah Anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan bentuk lembaga perwakilan rakyat daerah (propinsi/kabupaten/kota) di Indonesia yang berkedudukan sebagai unsur yang menyelenggarakan program pemerintah daerah bersama dengan pemerintah daerah. Anggota DPRD terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan yang dipilih berdasarkan pemilihan umum. Dalam struktur pemerintahan daerah, DPRD berada di tiga wilayah administratif, yaitu di tingkat provinsi disebut DPRD Provinsi berkedudukan di ibukota provinsi, tingkat kabupaten disebut DPRD Kabupaten berkedudukan di ibukota kabupaten, dan tingkat kota disebut DPRD Kota, berkedudukan di kota. Pengawasan dan pemeriksaan merupakan faktor-faktor penting dalam peningkatan kinerja suatu pemerintah daerah. Pengawasan dilakukan oleh lembaga legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Tujuan dari dilakukannya fungsi pengawasan adalah

agar pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran yang ada dan dapat digunakan dengan sebagaimana mestinya. Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD diharapkan dapat membantu dan memastikan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajibannya dalam hal pelayanan publik dan mensejahterakan masyarakat. Anggota DPRD memiliki tugas untuk melakukan peningkatan pengawasan terhadap pemerintah daerah sehingga berdampak pada peningkatan kinerja pemerintah daerah.

Menurut (Halim, 2016) keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam kerangka penyelenggaraan pemerintah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segaa bentuk dari kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban dari daerah tersebut, dalam kerangka APBD. Keuangan negara sendiri dapat diartikan juga semua hak dan kewajiban negara serta segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban negara serta segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban tersebut yang dapat dinilai dengan uang.

Dalam sistem pemerintahan daerah, DPRD dan pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab dan kewajiban yang sama dalam mewujudkan suatu pemerintahan daerah membunyai tanggung jawab dan kewajiban yang sama dalam mewujudkan tujuan dari pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan sebaik mungkin bagi masyarakat daerah agar menjamin suatu kepuasan masyarakat dan untuk meningkatkan produktivitas dan tingkat kesejahteraan masyarakat dari daerah tersebut.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai lembaga pemerintah daerah. Sebagai unsur lembaga pemerintah daerah maka DPRD mempunyai tanggung jawab yang sama dengan pemerintah daerah dalam rangka menjalankan roda pemerintah daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah mitra kerja dan memiliki kedudukan yang sejajar dengan pemerintah daerah yang juga mempunyai hak budget (hak untuk menetapkan anggaran sekaligus melakukan pengawasan pelaksanaan APBD) (Govindarajan,2006). Jumlah anggota DPRD Kabupaten dan Kota sekurang-kurangnya adalah 20 atau sebanyak-banyaknya 45 orang. Peresmian keanggotaan DPRD Kabupaten dan Kota dilakukan melalui keputusan Gubernur. Setiap anggota DPRD Kabupaten atau Kota harus berdomisili di Kabupaten atau Kota tersebut.

2.4.2. Jumlah OPD

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yaitu pemerintah daerah merupakan salah satu entitas pelaporan, yaitu unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Dalam definisi tersebut, yang dimaksud entitas akuntansi adalah satuan kerja perangkat daerah.

Sebagai pemegang kekuasaan penyelenggaraan pemerintah daerah sekaligus pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan daerah, Kepala Daerah, selanjutnya melimpahkan kekuasaanya tersebut untuk dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelolaan keuangan daerah dan dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelolaan keuangan daerah dan dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) selaku pejabat pengguna anggaan/pengguna barang di bawah koordinasi sekretaris daerah. Pembuatan laporan keuangan yang dilakukan dari masing-masing OPD akan dikonsolidasikan oleh OPD untuk menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten.

2.4.3. Pendidikan Terakhir Kepala Daerah

Kepala Daerah adalah posisi sentral dan strategis dalam sistem Pemerintahan Daerah. Seorang Kepala Daerah harus menerapkan pola kegiatan yang dinamik, aktif, kreatif, serta komunikatif, menerapkan pola kekuasaan yang tepat damun pola perilaku kepemimpinan yang disesuaikan dengan kebutuhan yang dipengaruhi dari latar belakang individual masing-masing Kepala Daerah karena kedudukan dan peran Kepala Daerah dalam sistem Pemerintah Daerah yang strategis.

Menurut Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang isinya Kepada Daerah adalah sebutan untuk kepala pemerintahan daerah dan merupakan pimpinan daerah yang mempunyai tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah. Selain itu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan,

Pengesahan Pengangkatam, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Gubernur dan Wakil Gubernur untuk propinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten serta Walikota dan Wakil walikota untuk Kota. Dari uraian diatas bahwa kepala daerah merupakan sebutan untuk pimpinan puncak di tingkat daerah. Menurut Notoatmodjo (2003) Pendidikan dan pelatihan adalah merupakan upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia, terutama untuk mengembangkan intelektual dan kepribadian manusia.

Tabel 2.2

Skala Pendidikan Terakhir Kepala Daerah

Pendidikan Terakhir	Skala
SMA	1
Strata 1	2
Strata 2	3
Strata 3	4

2.4.4. Luas Wilayah

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentutkan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional (Ardhini, 2011). Luas Daerah dalam hal ini apakah bersarannya berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah provinsi.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 luas wilayah merupakan variabel yang mencerminkan kebutuhan atas penyediaan sarana dan prasarana per satuan wilayah. Maksudnya semakin besar luas wilayah suatu daerah pemerintahan maka semakin banyak juga sarana dan prasarana yang harus disediakan pemerintah daerah agar tersedia pelayanan publik yang baik. Luas wilayah dalam penelitian ini merupakan ukuran besarnya daerah wewenang suatu pemerintahan yang dapat diukur dengn satuan angka. Yang sebenarnya luas wilayah antara satu daerah dengan daerah yang lainnya memiliki luas yang tidak sama, sehingga kebutuhan akan pengungkapan laporan keuangan antara satu daerah dengan daerah lain akan berbeda.

2.5. Kerangka Penelitian

Penelitian ini mencoba untuk menjelaskan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan latar belakang, tujuan penelitian, dan tinjauan pustaka yang telah diuraikan sebelumnya, maka terlebih dahulu akan dikembangkan kerangka konseptual penelitian. Kerangka konseptual adalah suatu model terintegrasi mengenai pola hubungan antar variabel yang akan diteliti berdasarkan pada kerangka proses berpikir. Berikut adalah gambaran kerangka konseptual:

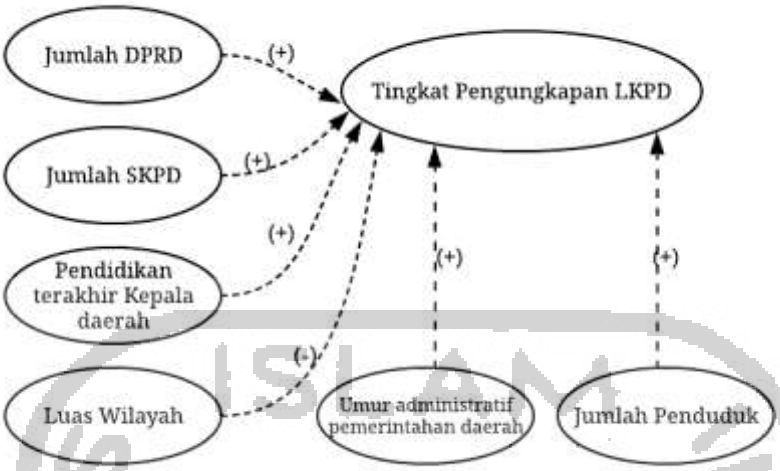

2.6 HIPOTESIS PENELITIAN

2.6.1 Pengaruh Jumlah DPRD Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah (provinsi/kabupaten/kota) yang bertugas untuk mengawasi pemerintah daerah agar dapat mengelola anggaran yagn ada untuk dapat dipergunakan dengan baik. Tugas yang diberikan kepada pemerintah daerah langsung dilakukan pengawasan oleh anggota legislatif.

Sumarjo (2010) menyatakan bahwa lembaga yang memiliki potensi dan peran strategis dalam pengawasan keuangan daerah yaitu lembaga legisatif atau DPRD. Seberapa besar pengeluaran pemerintah yang akan dilakukan dan berapa pemasukan yang akan diterima juga harus diperhatikan oleh lembaga legislatif. Pemerintah daerah dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik apabila pemerintah menghasilkan pendapatan yang besar dengan pengeluaran yang kecil. Tugas dari DPRD yaitu mengawasi pemerintah

daerah agar pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggatan yang ada untuk dapat didayagunkan dengan baik. Banyaknya jumlah anggota DPRD diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap pemerintah daerah sehingga mampu memberikan dampak peningkatan kinerja pemerintah daerah.

Penelitian Syafitri (2012) menemukan bahwa jumlah legislatif atau DPRD berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan. Peranan DPRD sebagai pengawas keuangan berjalan dengan baik sehingga dapat mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Semakin besar jumlah anggota legislatif maka diharapkan akan semakin besar tingkat pengawasan yang dilakukan oleh anggota legislatif. Dari uraian tersebut, maka hipotesis penelitian ini adalah :

H_1 = Jumlah anggota DPRD berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah

2.6.2 Pengaruh Jumlah OPD Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Di Indonesia, diferensiasi fungsional dalam pemerintahan lebih dikenal dengan nama Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Jumlah OPD merupakan gambaran dari jumlah urusan yang menjadi prioritas dari pemerintah daerah dalam membangun daerah. Semakin kompleks pemerintah tersebut membuktikan bahwa semakin banyak juga urusan yang menjadi prioritas pemerintah daerah tersebut. Jumlah OPD merupakan proksi dalam

menjelaskan kompleksitas pemerintah. Semakin kompleks suatu pemerintahan dapat berarti semakin banyak jumlah OPD-nya.

Dalam struktur pemerintahan Indonesia, pembagian departemen fungsional dengan organisasi perangkat daerah (OPD). Organisasi perangkat daerah merupakan entitas akuntansi yang wajib melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi yang terjadi di lingkungan pemda. Semakin banyak jumlah OPD yang ada didaerah tersebut maka berarti semakin kompleks juga pemerintahan tersebut dan semakin besar juga tingkat pengungkapan yang harus dilakukan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Khasanah & Rahardjo, 2014) memberikan hasil penelitian yang mendukung uraian diatas. Penelitian tersebut menyatakan bahwa jumlah dari Satuan Kerja Perangkat Daerah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Dari uraian tersebut maka hipotesis dari penelitian ini adalah :

H_2 = Jumlah SKPD berpengaruh positif terhadap pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah provinsi.

2.6.3 Latar belakang pendidikan Kepala Daerah Berpengaruh Terhadap Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi

Latar belakang pendidikan merupakan historis pendidikan yang pernah dilampaui oleh seseorang. Seseorang yang memiliki pengetahuan dan keahlian mempunyai kesanggupan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan

spesifik. Pendidikan yang lebih tinggi juga dapat mempengaruhi dalam baik dalam penyesuaian atas adanya aturan baru dan memounyai pengetahuan, keahlian, atau kesanggupan dalam mengesahkan laporan keuangan. Latar belakang pendidikan dan jenjang pendidikan menjadi faktor yang penting dalam penyelesaian sebuah pekerjaan (Sutaryo, 2013).

Sebagai pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah dituntut untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Secara organsasi kepala daerah bertanggung jawab sepenuhnya atas sistem pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh kepala OPD sebagai pejabat pengelola keuangan daerah. Kepala daerah dan atau wakil kepala daerah yang memiliki latar belakang ekonomi atau akuntansi secara logika akan lebih mudah dalam memahami dan menerapkan standar akuntansi pemerintahan dalam penyajian laporan keuangan daerahnya sendiri. Suhardjanto (2010) melakukan penelitian yang menyatakan bahwa latar belakang pendidikan bupati merupakan prediktor yang signifikan terhadap kepatuhan pengungkapan SAP yang wajib. Dari uraian tersebut maka hipotesis dari penelitian ini adalah.

H_3 = Latar Belakang pendidikan Kepala Daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah

2.6.4 Luas Wilayah Berpengaruh Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi

Daerah dengan wilayah yang lebih luas membutuhkan tingkat pengungkapan yang berbeda dibandingkan dengan wilayah yang memiliki luas lebih sempit. Kaitan antara Luas Wilayah Daerah dengan tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerinth daerah yang kemudian dihubungkan dengan teori Institusional dapat terlihat ketika suatu daerah yang memiliki luas wilayah yang besar ingin melakukan pengungkapan laporan keuangan maka akan berbeda dengan daerah yang memiliki luas wilayah yang lebih sempit dan akan berpengaruh terhadap kualitas dari laporan keuangan dari daerah tersebut.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kusnandar dan Dodik (2009) luas wilayah daerah memang mempunyai pengaruh terhadap komunikasi dan koordinasi antar instansi pemerintah daerah karena daerah dengan wilayah yang lebih luas dimana lebih membutuhkan komunikasi dan koordinasi tingkat daerah yang lebih.

Daerah yang mempunyai wilayah luas dan memiliki jumlah penduduk yang sama dengan luas wilayah yang ukurannya lebih sempit akan memiliki dampak yang berbeda dengan tingkat pengungkapan LKPD. Komunikasi dan koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang memiliki luas wilayah sempit akan lebih efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan kualitas pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa hipotesis luas wilayah tidak

berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

H_4 = Luas Wilayah berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan sampel laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota yaitu 97 kabupaten/kota dalam kurun setahun yaitu tahun 2017. Dalam metode penelitian akan dijelaskan bagaimana variabel-variabel diukur. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda dimana sebelumnya dilakukan uji statistik deskriptif dan uji asumsi klasik.

3.1. POPULASI DAN SAMPEL PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan sampel pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia untuk tahun anggaran 2017 yang telah diaudit oeh BPK RI dan memiliki data terkait dengan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Pemilihan sampel dilakukan dengan cara *purposive sampling* dengan memilih beberapa kabupaten/kota di Indonesia. Kriteria-kriteria atas sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten/Kota tahun 2017 yang telah diaudit oleh BPK.
2. Data yang dimiliki lengkap untuk pengukuran seluruh variabel:
    a. Menyediakan 4 komponen LKPD Kabupaten/Kota pada tahun 2017 yang telah diaudit oleh BPK.
    b. Menyediakan data jumlah OPD sebagai entitas akuntansi tahun 2017 pada Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah/Laporan Hasil Pemeriksaan Sistem Pengendalian Internal.

c. Menyediakan data latar belakang Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah tahun 2017

d. Menyediakan data jumlah anggota DPRD tahun 2017 pada Daerah Dalam Angka (DDA) masing-masing Pemda atau melalui situs resmi Pemda.

e. Menyediakan data umur administratif Pemda yang diukur dari Undang-Undang pembentukannya sampai dengan tahun 2017.

3.2. METODE PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara dokumentasi, atau yang sering disebut dengan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber data dan publikasi lainnya (Siyoto & Sodik, 2015). Data yang digunakan berupa laporan keuangan pemerintah daerah provinsi yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Data yang diambil pada penelitian ini adalah data dari laporan keuangan pemerintah daerah provinsi tahun 2017.

3.3. DEFINISI DAN PENGUKURAN VARIABEL PENELITIAN

3.3.1. Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen atau terikat atau disebut dengan variabel output, adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena terdapat

variabel bebas atau independen (Siyoto & Sodik, 2015). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia. Tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dimaksud ialah berupa perbandingan antara pengungkapan yang telah disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi dengan pengungkapan yang seharusnya disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang dibuat sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku.

Mekanisme pengukuran tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah adalah

a. Membuat daftar pengungkapan berdasarkan SAP dan Permendagri No.13/2006.
b. Memberikan nilai untuk setiap pengungkapan dalam LKPD sesuai dengan daftar pengungkapan. Pemberian nilai dibagi menjadi 3 bagian, yaitu "ya", "tidak", dan "*not available*". Setiap satu item pengungkapan yang sesuai dengan daftar pengungkapan diberi nilai 1.
c. Menjumlahkan nilai-nilai yang didapat untuk setiap laporan keuangan pemerintah daerah.
d. Menghitung tingkat pengungkapan dengan membagi jumlah nilai yang diperoleh dengan nilai maksimum yang seharusnya diperoleh jika melakukan pengungkapan penuh.

$$DISC = \frac{\text{Pengungkapan dalam LKPD}}{\text{Pengungkapan dalam PSAP}}$$

Pengukuran tingkat pengungkapan dalam penelitian ini dengan menggunakan sistem skoring, sistem skoring yaitu system pemberian skor pada daftar checklist pengungkapan. Daftar checklist pengungkapan dibuat dengan menggungkan dasar pengungkapan yang diwajibkan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang dilengkapi dengan peraturan yang terdapat dalam Permendagri No. 13/2006.

3.3.2. Variabel Independent (X)

Variabel independent atau yang diebut dengan variabel bebas, adalah variabel yang mempengaruhi atau yang dapat menjadi sebab pada perubahan atau timbulnya dari variabel terikat. Variabel independent yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Jumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah, Jumlah Organisasi Perangkat Daerah, Umur pemerintah daerah dan Kemandirian daerah. Variabel-variabel ini diperoleh dari laporan keuangan pemerintah provinsi. Adapun pengukuran masing-masing variabel independent adalah sebagai berikut:

3.3.2.1. Jumlah Anggota DPRD

Jumlah anggota DPRD akan digunakan dalam penelitian ini dan dijadikan sebagai proksi dalam mengukur ukuran legislatif. Digunakannya jumlah anggota DPRD sebagai ukuran dalam mengukur ukuran legislatif telah banyak digunakan dalam penelitian sebelumnya. DPRD merupakan suatu lembaga perwakilan rakyat yang memiliki fungsi pengawasan terutama

dalam hal pengawasan keuangan daerah. Terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, dalam pasal 21 UU No. 15 tahun 2004, disebutkan bahwa lembaga legislatif dapat meminta kepada pemerintah daerah untuk melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan agar kualitas laporan keuangan semakin baik. Sehingga diharapkan dengan semakin banyak jumlah anggota DPRD akan semakin meningkatkan pengawasan yang berujung pada peningkatan pengungkapan laporan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat.

$$LEG = LN(jumlah\ anggota\ DPRD)$$

3.3.2.2. Jumlah OPD

Menurut peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2012, Organisasi Perangkat Daerah atau disingkat dengan OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, OPD merupakan sebuah entitas akuntansi yaitu unit pada pemerinthan yang bertuhas mengelola angaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya.

$$OPD = LN\ (jumlah\ OPD)$$

3.3.2.3. Pendidikan Terakhir Kepala Daerah

Pendidikan sangat penting bagi kehidupan manusia, karena melalui pendidikan seseorang mampu mengembangkan potensinya, sehingga dapat mewujudkan kepribadian, kecerdasan serta keterampilan yang diperlukan. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditempuh seseorang maka semakin komplek pengetahuan dan keterampilan serta pengalaman yang dimilikinya. Orang yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang tinggi maka logikanya akan semakin baik dalam menjalankan pekerjaannya dibanding orang yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah (Sutaryo, 2013).

$$PENDIDIKAN = (Pendidikan\ Terakhir\ Kepala\ Daerah)$$

3.3.2.4. Luas Wilayah

Luas Wilayah adalah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional kecil (Siswantoro,2012).

$$Luas\ Wilayah\ = LN(Luas\ Wilayah)$$

3.3.3. Variabel Kontrol

3.3.3.1. Jumlah Penduduk

Lembaga BPS dalam Statistik Indonesia (2013) menjelaskan "penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap". Sensus penduduk yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali merupakan sumber utama data kependudukan. Untuk data dari tahun yang tidak dilaksanakan sensus penduduk, data kependudukan diperoleh dari hasil proyeksi penduduk. Proyeksi penduduk merupakan suatu perhitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi dari komponen-komponen perubahan penduduk, yaitu kelahitan, kematian, dan imigrasi.

Hilmi dan Martani (2012) melakukan penelitian yang menyatakan bahwa jumlah penduduk berhubungan positif dan signifikan dengan tingkat pengungkapan dikarenakan semakin besar jumlah penduduk makin besar juga dorongan dari masyarakat dalam permintaan pengungkapan yang lebih besar sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas.

$$JUMLAH\ PENDUDUK\ = LN\ (Jumlah\ Penduduk)$$

3.3.3.2. Umur Pemerintahan Daerah

Umur suatu organisasi dapat dilihat dari seberapa lama organisasi tersebut berlangsung sejak didirikannya. (Setyaningrum & Syafitri, 2012)

Umur administratif pemerintah daerah adalah tahun dari dibentuknya suatu pemerintah daerah berdasarkan undang-undang pembentukan daerah tersebut.

Kelengkapan laporan sendiri memiliki korelasi dengan umur pemerintahan. Semakin lama umur pemerintahan maka semakin tinggi pada tingkat pengungkapan laporan keuangannya, karena pengalaman yang baik dalam penyusunan laporan keuangan didapatkan dari semakin tua umur suatu daerah.

$$UMUR = LN\ (Umur\ Pemda\ berdasarkan\ undang - undang\ pembentukan\ Pemda)$$

3.4. Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan suatu teknik atau prosedur yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian. Pegujian yang digunakan di dalam metode ini dapat berupa analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis.

3.4.1. Statistik Deskriptif

Statististik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, *sum*, *range*, *kurtosis*, dan *skewness* (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2016; 19). *Mean* dapat digunakan untuk memperkirakan berapa besar rata-rata populasi yang diperkirakan dari sampel. Maksimum-minimum digunakan untuk melihat gambaran keseluruhan dari sampel yang berhasil

dikumpukan dan memenuhi syarat untuk dijadikan sampel penelitian. Standar deviasi dapat digunakan sebagai penentu jenis data yang sering terjadi di dalam penelitian.

3.4.2. Uji Asumsi Klasik

Tahapan dalam pengujian dengan uji regresi berganda menggunakan beberapa asumsi klasik yang harus dipernuhi meliputi: uji normalitas, uji multikolineritas dan uji heterokedastisitas. Tujuan dari uji asumsi klasik ini sendiri yaitu agar dapat mengetahui apakah hasik dari regresi berganda terjadi penyimpangan dari asumsi klasik:

3.4.2.1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan tujuan untuk mengukur apakah didalam model regresi variabel independen dan variabel dependen keduanya mempunyai distribusi normal atau mendekati normal (Ghozali, 2016). Sesuai dengan Ghozali, penelitian ini menggunakan uji statistik non-parametrik *Kolmogronov-Smirnov*. Adapun dua cara yang dapat digunakan dalam penelitian ini untuk mendeteksi apakah hasilnya residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik.

Pengujian normalitas yang melalui analisis grafik dilakukan dengan cara menganalisis grafik normal probability plot yang membandingkan antara distribusi kumulatif dengan distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan ploting data residual akan dibandingkan dengan garis 64 diagonal. Titik-titik yang tersebar di sekitar

garis diagonal yang bisa dikatakan sebagai data yang normal dan penyebarannya mengikuti garis diagonal (Ghozali, 2016).

3.4.2.2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak akan terjadi korelasi di antara variabel independennya. Pendekatan adanya multikolinieritas adalah dengan melihat nilai dari *Variance Inflation Factor (VIF).* Jika nilai VIF kurang dari 10, maka tidak ada gejala multikolnieritas. Sebaliknya, jika nilai VIF lebih dari 10 atau nilai *tolerance* lebih dari 0,10 , maka terdapat gejala multikolinieritas (Gani & Amalia, 2015).

3.4.2.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah adalah model regresi terjadi ketidaksamaan *Variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *Variance* dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda maka disebut heterokedastisitas. Ada tidaknya heterodastisitas dapat diuji dengan mengggunakan *glejser* dengan banuan aplikasi SPSS. Nilai signifikansinya adalah >0,05 yang menunjukkan bahwa tidak ada masalah heterokedastisitas.

3.4.3. Analisis Regresi Berganda

Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda (*multiple regression analisys*). Analisis regresi berganda berupakan metode

statistik yang berfungsi untuk menguji pengaruh dua atau lebih variable independen terhadap satu variabel dependen. Persamaan regresi berganda dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6$$

Keterangan:

Y	= Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib
α	= Persamaan Regresi
$\beta_1 - \beta_6$	= Koefisien regresi variabel independen
X_1	= Jumlah DPRD
X_2	= Jumlah SKPD
X_3	= Pendidikan Terakhir Kepala Daerah
X_4	= Luas Wilayah
X_5	= Umur Administratif Pemerintah Daerah
X_6	= Jumlah Penduduk

3.4.4. Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi dapat digunakan untuk melihat kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Koefisien determinasi dapat dilihat dari *Adjusted* R^2 yang diubah ke dalam bentuk presentase. Presentase sisanya akan dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian.

3.4.5. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan secara parsial, atau menggunakan uji statistik t. Uji statistik t,yaitu pengujian koefisien regresi secara parsial dengan menenentukan formula statistik yang akan di uji. Uji staitistik t digunakan untuk

mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai t-hitung dengan t-tabel atau dengan melihat nilai signifikansi dari t-hitung. Jika nilai t-hitung >t-tabel atau nilai signifikansi $t < \alpha = 0{,}05$ maka H_0 ditolak. Kesimpulanya adalah variabel independen secara parsial signifikan mempengaruhi variabel dependen.

BAB IV

ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari jumlah anggota SKPD, Jumlah OPD, Pendidikan Terakhir Kepala Daerah terhadap tingkat pengungkapan wjaib lapoan keuangan pemerintah daerah. Dalam bab ini akan akan diuraikan hasil penelitian mengenai pengaruh jumlah anggota DPRD, Jumlah OPD, Pendidikan Terakhir Kepala Daerah terhadap tingkat pengungkapan wajib dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder dengan 97 laporan keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2017. Hasil dari analisis hasil penelitian ini akan menjadi informasi dalam menjawab permasalahan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya. Masing-masing data tersebut merupakan data yang dicantumkan di dalam laporan keuangan pemerintah daerah provinsi. Tingkat pengungkapan akan dihitung sesuai dengan jumlah pengungkapan wajib pemerintah daerah provinsi dalam laporan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

4.1. ANALISIS STATISTIK DESKRIPTIF

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa variabel yaitu jumlah anggota DPRD, jumlah OPD, pendidikan terakhir kepala daerah, luas wilayah sebagai variabel independen dan umur administratif pemerintahan daerah, jumlah penduduk sebagai variabel kontrol serta Tingkat Pengungkapan Wajib

Laporan Keuangan Daerah sebagai variabel dependen. Variabel tersebut telah diuji secara statistik deskriptif seperti yang terlihat pada tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1

Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	n	Minimum	Maximum	Mean	Standar Deviasi
DPRD (Jumlah DPRD)	97	3,00	3,91	3,5763	0,27299
OPD (Jumlah OPD)	97	3,18	4,39	3,8500	0,24541
PENDIDIKAN (Pendidikan Terakhir Kepala Daerah)	97	1	4	0,9717	0,39618
PENDUDUK (Jumlah Penduduk)	97	10,61	15,96	13,0182	0,99546
LUAS (Luas Wilayah)	97	3,23	10,69	6,8227	1,73792
UMUR (Umur Administratif Pemerintahan Daerah)	97	2,3	4,28	3,6324	0,62966
PENGUNGKAPAN (Tingkat Pengungkapan Wajib LKPD)	97	0,47	0,7	0,6171	0,04088

Hasil Data Diolah, 2019

Dari hasil analisis statistik deskriptif pada Tabel 4.1 diatas, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Variabel Jumlah anggota DPRD diukur dengan jumlah anggota DPRD yang ada di daerah kabupaten/kota tersebut. Dalam uji ini jumlah anggota DPRD di ubah kedalam bentuk natura logaritma. Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif pada Tabel 4.1 di atas maka dapat diketahui bahwa

Jumlah anggota DPRD mempunyai nilai minimum sebesar 3,00 nilai maksimum sebesar 3,91 dengan rata-rata nilai 3,5763 dan standar deviasi sebesar 0,27299. Nilai minimal sebesar 3,00 artinya daerah yang memiliki jumlah anggota DPRD terkecil adalah Kota Sabang, Kabupaten Aceh jaya, Kota Pariaman, Kota Tomohon, Kabupaten Buru, Kabupaten Asmat, Kabupaten Fak-Fak, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Natuna yang berjumlah 20 orang sedangkan Kabupaten/Kota yang memiliki jumlah anggota DPRD yang tertinggi dengan jumlah 50 orang yaitu Kota Medan, Kota Batam, Kota Bandung, Kota Bekasi, Kabupaten Cianjur.

2. Jumlah Organisasi Perangkat Daerah diukur berdasarkan dari total jumlah Organisasi Perangkat Daerah pada pemerintah provinsi dan diubah ke dalam bentuk natura logaritma. Tabel 4.1 menjelaskan hasil uji statistik deskriptif yang diketahui bahwa angka minimum 3,81 sedangkan angka maksimum 4,39 dan ukuran rata-rata 3,8500. Pemerintah daerah yang memiliki jumlah OPD terendah adalah Kabupaten Barito Timur sebanyak 24 dan pemerintah daerah yang memiliki jumlah OPD tertinggi adalah Kota Manado dengan jumlah 135 OPD.
3. Pendidikan terakhir menggunakan skala pengukuran yang dikelompokkan menjadi 4 angka. Tabel 4.1 menjelaskan hasil uji statistik deskriptif yang diketahui bahwa angka minimum 1 dan maksimum 4 . Ada beberapa kepala daerah Kabupaten/Kota yang memiliki riwayat pendidikan terakhir tingkat SMA hingga tingkat S3.

4. Luas wilayah diukur dengan menggunakan total luas wilayah dari Kabupaten/Kota tersebut. Hasil statistik deskriptif pada Tabel 4.1 di atas dapat diketahui bahwa Luas Wilayah Kabupaten/Kota memiliki rata-rata 6,8227. Pemerintah daerah yang memiliki Luas Wilayah yang terluas adalah Kabupaten Marauke sebesar 44.071 km^2 dan Kota Bukittinggi memiliki Luas Wilayah tersempit sebesar 25,24 km^2.
5. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Tabel 4.1 yang merupakan hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa pengungkapan LKPD tahun 2017 pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Kota Semarang menunjukkan tingkat pengungkapan tertinggi sebesar 70,7% sedangkan Kota Pariaman menunjukkan tingkat pengungkapan terendah yaiu hanya 47,34%. Nilai rata-rata pengungkapan LKPD pada periode tahun 2017 sebesar 61,71%, pengungkapan LKPD yang dilakukan oleh pemerintah daerah cenderung meningkat dari tahun ke tahun namun ada beberapa daerah yang mengalami penurunan.

4.2. UJI ASUMSI KLASIK

Uji asumsi klasik dilakukan untuk menguji model regresi sehingga diperoleh model regresi dari metode kuadrat terkecil yang menghasilkan estimator linier tidak bias. Model regresi yang diperoleh berdistribusi normal dan terbebas dari gejala mutikolieneritas, dan heteroskedastisitas.

4.2.1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji data yang akan dianalisis untuk melihat apakah data tersebut memiliki distribusi yang normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji *Kolmogorov-smirnov* terhadap nilai residual pada hasil persamaan regresi. Apabila nilai sig > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa dat berdistribusi normal. Hasil uji normalitas pada penelitian ini disajikan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2.

Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		97
Normal Parameters	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.03897876
Most Extreme Differences	Absolute	.068
	Positive	.042
	Negative	-.068
Test Statistic		.068
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200

Hasil data Diolah, 2019

Dari Tabel 4.2 uji normalitas diketahui bahwa nilai pada *Asymp.* Sig (2-tailed) adalah 0,200, yang berarti nilai tersebut lebih besar dari nilai sig. Berdasakan hasil dari uji normalitas data yang diolah dapat dikatakan berdistribusi normal. Hal ini menunjukkan bahwa uji normalitas telah terpenuhi dan data yang digunakan layak untuk diolah.

4.2.2. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Pengujian untuk

mengetahui adanya multikolinearitas dilakukan dengang memperhatikan besarnya tolerance value dan besarnya VIF (Ghozali, 2016). Jika nilai *tolerance* value >0,10 atau < 1 dan VIF < 10, maka tidak terjadi multikolinearitas. Hasil uji multikolinieritas ditunjukkan pada Tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3

Uji Multikolonieritas

Hasil Data Diolah,2019

Variabel	**Collinearity Statistics**		**Kesimpulan**
	Tolerance	**VIF**	
DPRD (Jumlah anggota DPRD)	0,324	3,087	Tidak terjadi multikolinearistas
OPD (Jumlah OPD)	0,801	1,249	Tidak terjadi multikolinearistas
PENDIDIKAN (Pendidikan Terakhir Kepala Daerah)	0,860	1,163	Tidak terjadi multikolinearistas
PENDUDUK (Jumlah Penduduk)	0,303	3,301	Tidak terjadi multikolinearistas
LUAS (Luas Wilayah)	0,883	1,132	Tidak terjadi multikolinearistas
UMUR (Umur Administratif Pemerintahan Daerah)	0,795	1,258	Tidak terjadi multikolinearistas

Tabel 4.3 diatas menunjukkan bahwa nilai dari VIF (*Variance Inflation Factor*) adalah < 10 untuk semua variabel. Dengan hasil nilai VIF dari Jumlah anggota DPRD sebesar 3,087; nilai VIF dari Jumlah OPD sebesar 1,249; nilai VIF dari Pendidikan Terakhir Kepala Daerah sebesar 1,163; nilai VIF Jumlah Penduduk sebesar 3,301; nilai VIF Luas Wilayah sebesar 1,132; nilai VIF Umur Administratif Pemerintah Daerah sebesar 1,258. Sedangkan

untuk nilai *Tolerance* > 0,10 atau < 1 dengan nilai *Tolerance* dari Jumlah anggota DPRD 0,324; nilai *Tolerance* dari Jumlah OPD sebesar 0,801; nilai *Tolerance* dari Pendidikan Terakhir Kepala Daerah sebesar 0,860; nilai *Tolerance* dari Jumlah Penduduk sebesar 0,303; nilai *Tolerance* dari Luas Wilayah sebesar 0,883; nilai *Tolerance* dari Umur Administratif Pemerintahan Daerah sebesar 0,795. Jadi berdasarkan nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) dan *Tolerance* dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung multikolinearitas, sehingga pengujian selanjutnya dapat dilanjutkan karena telah memenuhi syarat pengujian asumsi klasik yaitu tidak terjadi multikolinearitas.

4.2.3. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas muncul ketika varian dari distribusi probabilitas gangguan tidak konstan untuk seluruh pengamatan atas variabel penelitian (Ghozali, 2016). Metode yang digunakan untuk menguji heteroskedastistias dalam penelitian ini memakai diagram *scatterplot*. Hasil uji heteroskedastisitas dapat ditunjukkan pada Gambar sebagai berikut:

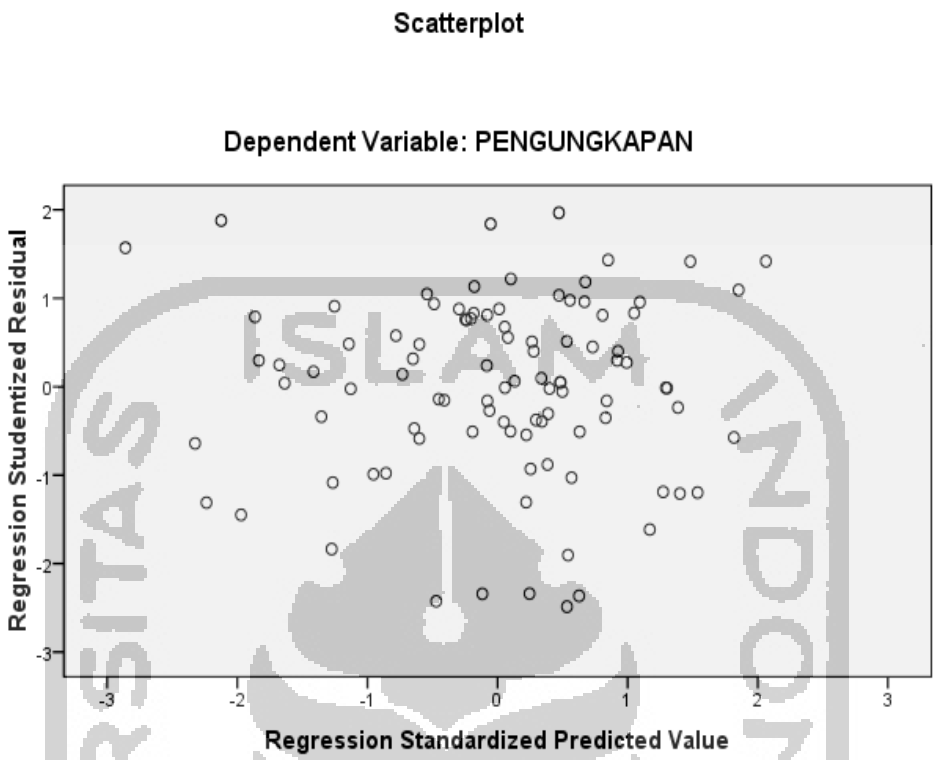

Hasil Data Diolah, 2019

Melalui grafik *scatter plot* pada gambar diatas maka dapat dilihat pola penyebaran data yang ada. Pola penyebaran data yang berupa titik-titik pada *scatter plot* menyebar di atas dan di bawah dan penyebarannya tidak membentuk pola tertentu, sehingga dari pola penyebaran ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Jadi, berdasarkan *scatter plot* diatas maka asumsi heteroskedastisitas terpenuhi.

4.3. ANALISIS REGRESI LINIER BERGANDA

Model analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel independen pada penelitian ini adalah Jumlah anggota DPRD, Jumlah

OPD, Pendidikan Terakhir Kepala Daerah, Luas Wilayah. Variabel yang akan dipengaruhi adalah tingkat pengungkapan LKPD Provinsi di Indonesia. Hasil Perhitungan regresi berganda pada penelitian ini disajikan dalam Tabel 4.4 berikut:

Tabel 4.4
Analisis Regresi berganda

Variabel	B	t	Sig.
(Constant)	0,609	8,081	0
DPRD (Jumlah anggota DPRD)	0,04	1,514	0,134
OPD (Jumlah OPD)	0,008	0,406	0,686
PENDIDIKAN (Pendidikan Terakhir Kepala Daerah)	0,008	0,675	0,502
LUAS (Luas Wilayah)	-0,005	-2,003	0,048
PENDUDUK (Jumlah Penduduk)	-0,005	-1,627	0,107
UMUR (Umur Administratif Pemerintahan Daerah)	0,006	0,803	0,424
	Adj R : 0,030		
	F : 1,502		
	Sig : 0,187		

Hasil Data Diolah, 2019

Secara matematis hasil dari analisis regresi berganda pada Tabel 4.4 dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y = 0{,}609 + 0{,}04X_1 + 0{,}008X_2 + 0{,}008X_3 – 0{,}005X_4 – 0{,}005X_5 + 0{,}006X_6$$

Dari persamaan diatas menunjukkan pengaruh variabel dependen (Y atau tingkat pengungkapan LKPD Kabupaten/Kota Di Indonesia). Arti dari koefisien regresi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar 0,609 menyatakan bahwa, apabila variabel bebas atau independen bernilai nol, maka nilai pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia adaah sebesar 0,609.
2. Koefisien regresi X1 sebesar 0,04 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 (satu) nilai X1 akan meningkatkan Y sebesar 0,04.
3. Koefisien regresi X2 sebesar 0,008 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 (satu) nilai X2 akan meningkatkan Y sebesar 0,008.
4. Koefisien regresi X3 sebesar 0,008 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 (satu) nilai X3 akan meningkatkan Y sebesar 0,008.

5. Koefisien regresi X4 sebesar -0,005 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 (satu) nilai X4 akan menurunkan Y sebesar 0,005.
6. Koefisien regresi X5 sebesar -0,005 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 (satu) nilai X5 akan menurunkan Y sebesar 0,005.
7. Koefisien regresi X6 sebesar 0,006 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 (satu) nilai X6 akan meningkatkan Y sebesar 0,006.

4.4. UJI KOEFISIEN DETERMINASI

Pengukuran koefisien determinasi merupakan pengujian yang bertujuan untuk milihat kemampuan variabel independen di dalam menjelaskan variasi perubahan variabel dependen. Hasil analisis koefisien determinasi dalam penelitian ini sebesar 0.030. Hasil ini mengindikasikan bahwa pengaruh atau kontribusi variabel independen yaitu Jumlah anggota DPRD, Jumlah OPD, Pendidikan Terakhir Kepala Daerah, Luas Wilayah sebesar 3,0% mempengaruhi variabel pengungkapan wajib LKPD sedangkan sisanya 97% dipengaruhi faktor lain diluar variabel yang diatas.

4.5. UJI HIPOTESIS

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji statistik t sebagai berikut:

1. Pengaruh jumlah anggota DPRD terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD

H_0 $b_1 = 0$ jumlah anggota DPRD berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD

H_1 $b_1 \neq 0$ jumlah anggota DPRD tidak berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD

Berdasarkan dari hasil perhitungan menggunakan uji statistik t, diperoleh nilai p-value hasil uji-t dari variabel jumlah anggota DPRD sebesar 0,134. Diakarenakan nilai p value lebih besar dari tingkat signifikan $\alpha = 5\%$ atau (0,134 > 0,05) maka H_1 ditolak, yang berarti jumlah anggota DPRD tidak berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD.

2. Pengaruh jumlah OPD terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD

H_0 : $b_2 = 0$ jumlah OPD berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD

H_1 : $b_2 \neq 0$ jumlah OPD tidak berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD

Berdasarkan dari hasil perhitungan menggunakan uji statistik t, diperoleh nilai p-value hasil uji-t dari variabel kekayaan pemerintah daerah sebesar 0,686. Dikarenakan p value lebih besar dari tingkat signifikan $\alpha = 5\%$ atau (0,686 > 0,05) maka H_2 ditolak yang berarti jumlah OPD tidak

berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD.

3. Pengaruh Pendidikan Terakhir Kepala Daerah terhadap pengungkapan wajib LKPD

   H_0 : $b_3 = 0$ Pendidikan terakhir kepala daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD

   H_1 : $b_3 \neq 0$ pendidikan terakhir kepala daerah tidak berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD

   Berdasarkan dari hasil perhitungan menggunakan uji statistik t, diperoleh nilai p-value hasil uji-t dari variabel pendidikan terakhir kepala daerah sebesar 0,502. Dikarenakan p value lebih besar dari tingkat signifikan α = 5% atau (0,502 > 0,05), maka H_3 ditolak, yang berarti pendidikan terakhir kepala daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD.

4. Pengaruh luas wilayah terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD

   H_0 : $b_4 = 0$ luas wilayah berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD

   H_1 : $b_4 \neq 0$ luas wilayah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD

Berdasarkan dari hasil perhitungan menggunakan uji statistik t, diperoleh nilai p-value hasil uji-t dari variabel luas wilayah sebesar 0,048 maka H_4 diterima yang berarti luas wilayah berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD.

4.6. PEMBAHASAN

Berdasarkan teori agensi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu : jumlah anggota DPRD, jumlah OPD, Pendidikan terakhir kepala daerah, luas wilayah. Hasil pengujian diatas menunjukkan bahwa jumlah anggota DPRD (H_1), jumlah OPD (H_2), pendidikan terakhir kepala daerah (H_3) dan luas daerah (H_4) tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah. Pembahasan sebagai berikut:

4.6.1. Pengaruh Jumlah Anggota DPRD terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib LKPD

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan bahwa koefisien varian adalah 0,04 yang berarti jika terdapat kenaikan jumlah anggota DPRD sebesar 1 satuan maka tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah naik sebesar 0,04 dengan asumsi variabel lainnya adalah konstan. Hasil olah data dengan regresi juga menunjukkan nilai sig. = 0,134 dengan *Level of Significant* = 5% maka disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh antara jumlah anggota DPRD (H_1) terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah (Y).

Jumlah anggota DPRD tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah kemungkinan karena jumlah anggota DPRD di daerah tersebut tidak dapat menekan tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah mungkin disebabkan karena saat ini anggota DPRD tidak dapat memilih kepala daerah sendiri dan pemilihan kepala daerah sudah dipilih oleh masyarakat langsung melalui PILKADA sehingga anggota DPRD tidak dapat memaksa kepala daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Setyaningrum dan Syafitri (2012) menyatakan bahwa ukuran legislatif yang menggunakan jumlah DPRD tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah dan tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Suhardjanto dan Yuliangtyas (2011) menyatakan bahwa ukuran legislatif berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

4.6.2. Pengaruh Jumlah OPD terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib LKPD

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan bahwa nilai b_2 adalah 0,008 yang berarti jika terdapat kenaikan jumlah OPD sebesar 1 satuan maka tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah naik sebesar 0,008 dengan asumsi variabel lainnya adalah konstan. Hasil olah data dengan regresi juga menunjukkan nilai sig.=0,686 dengan

Level of Significant = 5% maka disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh antara jumlah OPD terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah (Y).

Pemeriksaan sistem pengendalian internal pemerintah daerah yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ditunjukkan hasil hubungan yang tidak signifikan antara jumlah OPD dengan tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini kemungkinan karena masih ditemukan pengelolaan dan penatausahaan keuangan OPD yang masih belum menjalankan fungsi dan tugas yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyusunan laporan yang dilakukan OPD yang sifatnya merupakan kewajiban pokok maka dalam sistem pencatatannya tidak ada pembaharuan jika ada perubahan peraturan tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan seperti perubahan basis akuntansi yakni basis kas menuju akrual.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Setyaningrum dan Syafitri (2012) dan Khasanah dan Raharjo (2014) yang menyatakan bahwa jumlah OPD tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Namun penelitian yang dilakukan oleh Nurtari dkk. (2016) tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa jumlah OPD berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

4.6.3. Pengaruh Pendidikan Terakhir Kepala Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib LKPD

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan bahwa nilai koefisien varian adalah 0,008 yang berarti jika terdapat kenaikan pendidikan terakhir kepala daerah sebesar 1 satuan maka tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah naik sebesar 0,008 dengan asumsi variabel lainnya adalah konstan. Hasil olah data dengan uji regresi juga menunjukkan bahwa nilai sig.=0,686 dengan *Level of Significant* = 5%, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh positif terhadap pendidikan terakhir kepala daerah (H_3) terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah (Y).

Sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah dituntut untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Suhardjanto (2010) latar belakang pendidikan Bupati berpengaruh signfikan dalam tingkat pengungkapan LKPD. Hal ini kemungkinan karena kepala daerah yang memiliki riwayat tingkat pendidikan terakhir yang tinggi mungkin saja bukan berlatar belakang ekonomi dan kurang memahami dan menerapkan standar akuntansi pemerintahan dalam penyajian laporan keuangannya, sehingga dalam penelitian ini latar belakang pendidikan kepala daerah tidak terbukti dapat memberikan dorongan untuk melakukan pengungkapan LKPD secara lengkap

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Setyaningrum & Syafitri (2012) yang menyatakan pendidikan terakhir tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa kepada daerah sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah (PKPKD) yang berwenang menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah. Seharusnya kepala daerah yang memiliki tingkat pendidikan terakhir tinggi dapat lebih mengelola keuangan daerah secara lebih baik, namun pada kenyataanya tingkat pendidikan terakhir kepala daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD.

4.6.4. Pengaruh Luas Wilayah terhadap Tingkat Pengungkapan wajib LKPD

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan bahwa nilai b_4 adalah -0,005 yang berarti jika terdapat kenaikan luas wilayah sebesar 1 satuan maka tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah turun sebesar 0,005 dengan asumsi variabel lainnya adalah konstan. Hasil olah data dengan regresi juga menunjukkan nilai sig.=0,048 dengan *Level of significant*= 5%, maka dapat disimpulkan bahwa luas daerah (H_4) berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah (Y).

Memiliki daerah yang luas merupakan suatu kelebihan dari daerah tersebut sehingga dapat meningkatkan potensi dari daerah tersebut.

Menurut Undang-Undang nomor 33 tahun 2004, luas wilayah merupakan salah satu variabel yang mencerminkan kebutuhan atas penyediaan sarana dan prasarana. Daerah yang mempunyai wilayah yang lebih luas, penduduknya sama dengan daerah yang mempunyai wilayah yang lebih sempit memiliki dampak yang berbeda dengan tingkat pengungkapan LKPD. Pemerintah daerah yang memiliki luas wilayah sempit dapat lebih mudah dan efektif dalam melakukan koordinasi dan komunikasi untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap laporan keuangan sehingga daerah yang memiliki wilayah yang lebih sempit memiliki tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah lebih tinggi daripada daerah yang memiliki wilayah yang luas. Koordinasi sangatlah penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, karena di dalamnya terdapat banyak kegiatan yang dapat mendukung suatu tujuan yang akan dicapai dari suatu daerah. Kebutuhan koordinasi timbul sewaktu-waktu apabila pemerintahan daerah bertanggung jawab atas kesempurnaan suatu tugas. Apabila terdapat keadaan saling bergantungan diantara kegiatan-kegiatan maka hasil yang efektif akan dapat tercapai. Pemerintah daerah yang memiliki luas wilayah yang besar dapat meningkatkan tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan dengan memperbaiki infrastruktur yang ada di daerah tersebut agar koordinasi dan komunikasi antar daerah dapat berjalan dengan lancar dan dapat dilakukan usaha “penyempitan daerah” yang salah satunya dengan cara pemekaran daerah sehingga pemerintah daerah yang bersangkutan dapat dengan mudah melakukan

komunikasi dan koordinasi antar lembaga/instansi di daerah tersebut dan hal ini akan memicu kenaikan tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah. Meskipun daerah tersebut sudah memiliki infrastruktur yang baik namun pertemuan fisik yang dilakukan dengan tujuan koordinasi antar daerah juga sangat diperlukan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusnandar dan Dodik (2009) luas wilayah daerah memang mempunyai pengaruh terhadap komunikasi dan koordinasi antar instansi pemerintah daerah karena daerah dengan wilayah yang lebih luas dimana lebih membutuhkan komunikasi dan koordinasi tingkat daerah yang lebih.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Jumlah anggota DPRD tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah. Besar kecilnya jumlah anggota DPRD tidak mempengaruhi tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa jumlah OPD tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah. Besar kecilnya jumlah OPD tidak mempengaruhi tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pendidikan terakhir kepala daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah. Tinggi rendahnya tingkat pendidikan terakhir dari kepala

daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah.

4. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa luas wilayah daerah berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah. Daerah yang memiliki wilayah yang sempit dapat mempermudah pemerintah daerah dalam koordinasi dan komunikasi sehingga tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah dapat lebih tinggi daripada daerah yang memiliki wilayah yang luas dengan jumlah penduduk yang sama dengan wilayah yang memiliki luas daerah lebih sempit.

5.2. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka diajukan saran sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk pemerintah daerah dan digunakan sebagai pertimbangan dalam membuat aturan pada ingkat internal maupun eksternal pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar daerah agar terjadi peningkatan atas jumlah pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Untuk penelitian selanjutnya dapat menambah variabel independen lain diluar variabel yang ada dalam penelitian ini, seperti rasio kemandirian, belanja modal, temuan audit, dan faktor-faktor lainnya.
3. Diharapkan Pemerintah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah dengan melakukan komunikasi antar daerah masing-masing agar tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan dapat meningkat jumlahnya setiap tahun. Pemerintah daerah dapat meningkatkan frekuensi untuk pertemuan fisik tatap muka antar pemerintah daerah dengan maksud melakukan koordinasi dan komunikasi untuk mencapai tujuan meningkatnya jumlah tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan setiap tahun.

Daftar Pustaka

Arifin, J. (2017). *SPSS 24 untuk Penelitian dan skripsi.* Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Badan Pusat Statistik. 2017. Jawa tengah Dalam Angka Tahun 2017

Ghozali, I . (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21 Edisi 7*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hilmi, A. Z. (2012). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi. *Skripsi*. Universitas Islam Indonesia.

Khasanah, N. L. (2014). Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas, dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Skripsi.* Universitas Diponegoro.

Khasanah, N. L., & Rahardjo, S. N. (2014). Pengaruh Karakterisrik, Kompleksitas dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Akuntansi, 3(3),* 1-11.

Lesmana, S. I. (2010). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib di Indonesia. *Thesis.* Universitas Sebelas Maret.

Mahmudi. (2011). *Akuntansi Sektor Publik.* Yogyakarta: UII Press.

_____. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik.* Yogyakarta: C.V Andi Offset.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 2010. Jakarta.

Republik Indonesia.1958. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Indonesia*.

_____.1999. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.*

_____.2003. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.*

_____.2004. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan dan Tanggung Jawb Keuangan Negara.*

Setyaningrum, D., & Syafitri, F. (2012). Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan. *Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 9(2),* 154-170.

Sumarjo, H. (2010). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Indonesia). *Skripsi*. Universitas Sebelas Maret.

Widarjono, A. (2015). *Statistika Terapan Dengan Excel & SPSS*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

Tabel *Checklist* Kriteria Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan

NAMA PROVINSI :

TAHUN :

CHECKLIST PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI				1	0
A	Penyajian informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro, serta pencapaian target sesuai Peraturan Daerah APBD				
	1	kebijakan fiskal/keuangan menungkapkan:			
		a	perbedaan penting posisi dan kondisi keuangan/fiskal periode berjalan dibandingkan dengan periode sebelumnya /dengan anggaran dengan rencana lainnya.		
		b	Kebijakan-kebijakan pemerintah dalam meningkatkan pendapatan, efisiensi belanja, dan penentuan sumber atau penggungkaan pembiayaan.		
	2		Ekonomi makro, menjelaskan pengungkapan:		
		a	Asumsi-asumsi indikator ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan APBD berikut tingkat pencapaiannya.		
		b	perbedaan asumsi ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan anggaran dibandingkan dengan realisasinya.		
B	Ikhtisar pencapaiankinerja keuangan selama tahun pelaporan				
	1		menjelaskan perubahan anggaran yang penting selama periode berjalan dibandingkan dengan anggaran yang pertama kali disahkan oleh DPR.		
	2		menjelaskan hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang ditetapkan, serta masalah lainnya yang dianggap perlu.		
	3		perbandingan target sebagaimana tertuang dalam APBN/APBD dengan realisasinya.		
C	Dasar penyajian laporan keuangan dan pengungkapan kebijakan akuntansi keuangan				
	Kebijakan Akuntansi				

	1		Penjelasan pertimbangan dan/atau pemilihan kebijakan akuntansi perlu disesuaian dengan kondisi entitas pelaporan		
			Isi kebijakan akuntansi meliputi penjalasan:		
		a.	Entitas pelaporan		
			i. Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta juridiksi tempat entitias tersebut berada		
			ii. Penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya		
			iii. Ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasionalnya.		
			iv. Jumlah unit entitas akuntansi yang secara struktural berada dibawahnya.		
		b	Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan.		
			Pernyataan penggunaan basis akuntansi yang mendasaro Laporan Keuangan Pemerintah yang semestinya diungkapkan.		
		c.	Basis penyusunan laporan keuangan adalah basis kas menuju akrual (*cash basis toward accrual)*, sehingga:		
			i. Basis yang digunakan dalam laporan keuangan realisasi anggaran adalah basis kas.		
			ii. Basis yang digunakan dalam neraca adalah basis akrual		
		d.	Basis pengakuan dan pengukuran:		
			Aset		
			Pengakuan aset: aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal/diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenugasannya berpindah.		
			Pengukuran aset, sebagai berikut:		
			i. Kas dicatata sebesar nilai nominal		
			ii. Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan		
			iii. Piutang dicatat sebesar nilai nominal		
			iv. Persediaan dicatat sebesar: (1) Biaya perolehan apabila dengan pembelian, (2) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, (3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.		

			v. Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya. Kecuali untuk investasi dalam saham berdasarkan tingkat kepemilikannya, yakni: 20% kepemilikan saham menggunakan metode biaya; 20%-50% kepemilikan saham menggunaan metode ekuitas; >50% menggunakan metode ekuitas. kepemilikan non permanen menggunakan nilai bersih yang direalisasikan.		
			vi. Aset tetap dicatat sebesar biaya erolehan, namun jika tidak dimungkinkan dapat didasarkan pada nilai wajar saat perolehan.		
			vii. Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.		
			Kewajiban		
			Pengakuan kewajiban: kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian ang dapat diukur dengan andal/diakui pada saar dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.		
			Pengukuran kewajiban: kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.		
			Kewajiban dalam mata uang asing dinyatakan dalam rupia dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.		
			Ekuitas		
			Ekuitas secara keseluruhan dicatat sebesar selisih antara aset dan kewajiban.		
			Ekuitas dana lancar dicatat sebesar selsih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek.		
			Ekuitas dana investasi dicatat sebesar selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.		
			Ekuitas dana cadangan dicatat sebesar cadangan yang ditujukan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.		
			Pendapatan		
			Pengakuan pendapatan: pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah		

			Pengukuran pendapatan: berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya.		
			Belanja		
			Pengakuan Belanja: belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah; khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunya fungsi perbendaharaan.		
			Penerimaan Pembiayaan		
			Pengakuan penerimaan pembiayaan saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.		
			Metode penyajian laporan arus kas		
			Metode penyajian yang digunakan untuk menyajikan laporan arus kas dan alasannya.		
		Penjelasan setiap pos pada laporan keuangan			
			NERACA		
			ASET		
			Kas dan setara kas		
			Menjelaskan rincian kas yang terdiri dari:		
			i. Kas di Kas Daerah		
			ii. Kas di Bendahara Pengeluaran		
			iii. Kas di Bendahara Penerimaan		
			Investasi Jangka Pendek		
			Menjelaskan rincian investasi jangka pendek.		
			Perubahan harga pasar		
			Piutang Pajak dan Bukan Pajak		
			Menjelaskan rincian piutang yang mencakup:		
			i. Piutang pajak		
			ii. Piutang Retribusi		
			iii. Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara		
			iv. Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		
			v. Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat		
			vi. Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		
			vii. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		
			viii. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi		
			ix. Piutang Lainnya		
			Persediaan		

			Penjelasaan lebih lanjut mengenai rincian persediaan seperti: perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat; barang/perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi; barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; barang yang masih dalam proses produksi yang ditujukan untuk dijual ayau diserahkan kepada masyarakat.		
			Kondisi persediaan tersebut.		
			Investasi Jangka Panjang		
			Menjelaskan rincian investasi jangka panjang berdasarkan jenisnya, meliputi:		
			i. Investasi Nonpermanen, mencakup:		
			(a) Pinjaman Jangka Panjang		
			(b) Investasi dalam Surat Utang Negara		
			(c) Investasi dalam proyek pembangunan		
			(d) Investasi nonpermanen lainnya		
			Penjelasan singkat atas perusahaan daerah		
			Perubahan pos investasi		
			ii. Investasi permanen, mencakup:		
			(a) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		
			(b) Investasi Permanen lainnya		
			Penjelasan singkat atas perusahaan daerah		
			Perubahan pos investasi		
			Aset Tetap		
			Menjelaskan klarifikasi aset tetap dan rincian lebih lanjut,meliputi:		
			i. Rincian Tanah		
			Penambahan/Pelepasan Tanah		
			ii. Rincian Peralatan dan Mesin		
			Penambahan/Pelepasan Peralatan dan Mesin		
			iii. Rincian Gedung dan Bangungna		
			Penambahan/Pelepasan Gedung dan Bangunan		
			iv. Rincian Jalan, Irigasi, dan Jaringan		
			Penambahan/Pelepasan Jalan,Irigasi, dan Jaringan		
			v. Rincian Aset Tetap Lainnya		
			Penambahan/Pelepasan Aset Tetap Lainnya		
			vi. Rincian Kontruksi dalam Pengerjaan		
			Informasi penyusutan, meliputi:		
			i. Nilai penyusutan		

			ii. Metode penyusutan yang digunakan		
			iii. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan		
			iv. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode		
		Tambahan jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan:			
			i. Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap		
			ii. Tanggal efektif penilaian kembali		
			iii. Jika ada, nama penilai independen		
			iv. Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti.		
			v. Nilai tercatat setiap jenis aset tetap		
		Tambahan untuk kontruksi dalam pengerjaan, meliputi:			
			i. Rincian kontrak kontruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaiannya dan jangka waktu penyelesaiannya.		
			ii. Nilai kontrak kontruksi dan sumber pembiayaannya.		
			iii. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan		
			iv. Uang muka kerja yang diberikan		
			v. Retensi		
		Dana cadangan			
			Penjelasan dana cadangan, meliputi:		
			i. Perda pembentukkannya		
			ii. Tujuan, jumlah, bentuk penanaman dana cadangan, dan rencana penggunaannya.		
		Aset Lainnya			
			Menjelaskan rincian aset lainnya yang mencakup:		
			i. Tagihan Penjualan Angsuran		
			ii. Tuntutan Perbendaharaan		
			iii. Tuntutan Ganti Rugi		
			iv. Kemitraan dengan Pihak Ketiga		
			v. Aset Tak Berwujud		
			vi. Aset Lain-lain		
			KEWAJIBAN		
			Utang Jangka Pendek		
			Rincian utang jangka pendek berdasarkan pemberi pinjaman, mencakup:		
			i. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		
			ii. Utang Bunga		

			iii. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		
			iv. Pendapatan Dibayar Dimuka		
			v. Utang Belanja		
			vi. Utang Jangka Pendek Lainnya		
			Utang Jangka Panjang		
			Rincian utang jangka panjang berdasarkan pemberi pinjaman, mencakup:		
			i. Utang Dalam Negri-Sektor Perbankan		
			ii. Utang Dalam Negeri- Obligasi		
			iii. Premium (Diskonto) Obligasi		
			iv. Utang Jangka Panjang Lainnya		
			Jumlah tunggakan disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur		
			Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku		
			Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo		
			Biaya pinjaman meliputi perlakuan biaya pinjaman, jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan, tingkat kapitalisasi yang digunakan.		
		Utang Jangka Panjang yang direstrukturisasi harus mengungkapkan:			
			i. Pengurangan pinjaman		
			ii. Modifikasi persyaratan utang		
			iii. Pengurangan tingkat bunga pinjaman		
			iv. Pengunduran jatuh tempo pinjaman		
			v. Pengurangan nilai jatuh tempo pinjama		
			vi. Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan		
		EKUITAS			
		klasifikasi ekuitas, meliputi:			
			i. **Ekuitas Dana Lancar**		
			Menjelaskan akun-akun pada ekuitas dana lancar, meliputi:		
			(a) Sisa Lebih Pembayaran Anggarn (SILPA)		
			(b) Cadangan Piutang		
			(c) Cadangan Persediaan		
			(d) Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek		
			ii. **Ekuitas Dana dan Investasi**		

			Menjelaskan akun-akun pada ekuitas dana investasi yang meliputi investasi yang:		
			(a) Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang		
			(b) Diinvestasikan dalam aset tetap		
			(c) Diinvestasikan dalam aset lainnya		
			(d) Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Panjang		
			iii. **Ekuitas Dana Cadangan**		
			Menjelaskan akun-akun pada ekuitas dana cadangan		
			LAPORAN REALISASI ANGGARAN		
			PENDAPATAN		
			Klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan, meliputi:		
			i. Rincian dan penjelasan PAD, yang terdiri dari:		
			(a) Pendapatan pajak daerah		
			(b) Pendapatan retribusi daerah		
			(c) Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan		
			(d) Lain-lain PAD yang sah		
			Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan presentase) atas selisih lebih kurang antara realisasi dan anggaran PAD		
			Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan prosentase) atas selisih lebih/kurang PAD periode ini dengan PAD periode yang lalu.		
			ii. Rincian dan penjelasan Pendapatan Transfer yang terdiri dari:		
			(a) Dana Perimbangan		
			Dana Bagi Hasil Pajak		
			Dana Bagi Sumber Daya Alam		
			Dana Alokasi Umum		
			Dana Alokasi Khusus		
			(b) Pendapatan Transfer Lainnya		
			Dana otonomi Khusus		
			Dana penyesuaian		
			Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan presentase) atas selisih lebih kurang antara realisasi dan anggaran transfer		
			Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan prosentase) atas selisih lebih/kurang antara transfer periode ini dan transfer periode yang lalu.		

			iii. Rincian dan Penjelasan lain-lain pendapatan yang sah, yang terdiri dari:		
			(a) Pendapatan Hibah		
			(b) Pendapatan Dana Darurat		
			(c) Pendapatan lainnya		
			Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan prosentase) atas selisih lebih/kurang antara realisasi dan anggaran lain-lain pendapatan yang sah.		
			Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan prosentase) atas seisih lebih/kurang antara lain-lain pendapatan yang sah periode ini dan lain-lain pendapatan yang sah periode lalu		
			BELANJA		
			i. Rincian dan penjelasan belanja operasi, yang terdiri dari:		
			(a) Belanja Pegawai		
			(b) Belanja Barang		
			(c) Bunga		
			(d) Subsidi		
			(e) Hibah		
			(f) Bantuan Sosial		
			Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan prontase) atas selisih lebih/kurang antara realisasi dan anggaran belanja		
			Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan prosentase) atas selisih antra belanja periode ini dan belanja periode yang lalu.		
			ii. Rincian dan penjelasan belanja modal, yang terdiri dari:		
			(a) Belanja Tanah		
			(b) Belanja Peralatan dan Mesin		
			(c) Belanja Gedung dan Bangunan		
			(d) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		
			(e) Belanja Aset Teap Lainnya		
			(f) Belanja Aset Lainnya		
			Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan prosentase) atas selisih lebih/kurang antara realisasi dan anggaran belanja		

			Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan prosentase) atas selisih antara belanja periode ini dan belanja periode yang lalu.		
			iii. Belanja Tak Terduga		
			Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan prosentase) atas seisih lebih/kurang antara realisasi dan anggaran belanja		
			Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan prosentase) atas selisih antara belanja periode ini dan belanja periode yang lalu.		
			TRANSFER		
			i. Rincian transfer/bagi hasil pendapatan ke kabupaten/kota, terdiri dari:		
			(a) Bagi hasil pajak ke kabupaten/kota		
			(b) Retribusi		
			(c) Pendapatan lainnya		
			Penjelasan (dengan nilai nominal dan prosentase) atas selisih lebih/kurang antara realisasi dan anggaran transfer.		
			Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan prosentase) atas selisih antara belanja periode ini dan belanja periode yang lalu.		
			PEMBIAYAAN		
			i. Rincian penerimaan pembiayaan, mencakup:		
			(a) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA)		
			(b) Pencairan dana cadangan		
			(c) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan		
			(d) Pinjaman Dalam Negeri		
			(e) Penerimaan kembali pinjaman		
			(f) Penerimaan piutang daerah		
			Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan prosentase) atas selisih lebih/kurnag antara realisasi dan anggaran penerimaan pebiayaan.		
			Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan prosentase) atas selisih antara penerimaan pemiayaan periode ini dan penerimaan pembiayaan periode yang lalu		
			ii. Rincian pengeluaran pembiayaan		
			(a) Pembentukkan dana cadangan		
			(b) Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah		

			(c) Pembayaran pokok Pinjaman Dalam Negeri		
			(d) Pemberian pinjaman		
			Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan prosentase) atas selisih lebih/kurang antara realisasi dan anggaran pengeluaran pembiayaan.		
			Penjelasan (dengan menyebut nilai nominal dan prosentase) atas selisih antara pengeluaran pembiayaan periode ini dan pengeluaran pembiayaan periode yang lalu.		
			LAPORAN ARUS KAS		
			i. Menjelaskan komponen arus masuk kas dan arus masuk keluar dari aktivitas operasi		
			ii. Menjelaskan komponen arus masuk kas dan arus keluar kas dari investasi aset non keuangan		
			iii. Menjelaskan komponen arus masuk kas dan arus masuk keluar dari aktivitas pembiayaan		
			iv. Menjelaskan komponen arus masuk kas dan arus keluar kas dari aktivitas non anggaran		
		e.	Kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan masa transisi SAP		
		f.	Kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan		
D	Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh pernyataan SAP yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan				
			Penjelasan mengenai kontijensi dan komitmen-komitmen lainnya.		
E	Pengungkapan lainnya.				
			Mengungkapkan kejadian-kejadian penting selama tahun pelaporan, seperti manajemen pemerintahan selama tahun berjalan, kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen baru, penggabungan/pemekaran entitas tahun berjalan, kejadian yang mempunyai dampak sosial.		
			Total item		

Sumber (Octasia, 2018), (Undang-undang Republik Indonesia No.71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan)

LAMPIRAN 2
UKURAN LEGISLATIF

Kota/Kabupaten	Jumlah DPRD
Kota Banda Aceh	30
Kota Sabang	20
Kab. Aceh Jaya	20
Kab. Aceh Utara	45
Kab. Nias	25
Kota Medan	50
Kab. Solok	35
Kota Bukittinggi	25
Kota Padang	45
Kota Pekanbaru	45
Kab. Muaraenim	45
Kota Lubuklinggau	30
Kab. Lampung Utara	45
Kab. Bangka	35
Kota Pangkalpinang	30
Kota Batam	50
Kota Bandung	50
Kota Bekasi	50
Kota Bogor	45
Kota Depok	25
Kab. Garut	50
Kab. Cianjur	50
Kota Semarang	50
Kota Surakarta	45
Kota Magelang	25
Kota Tegal	30
Kab. Wonosobo	41
Kab. Boyolali	26
Kab. Purworejo	45
Kab. Brebes	50
Kab. Cilacap	50
Kota Salatiga	25
Kota Pekalongan	35
Kab. Bantul	45
Kab. Kulon Progo	40

Kab. Sleman	50
Kota Yogyakarta	30
Kab. Gresik	50
Kota Surabaya	50
Kota Malang	45
Kab. Sidoarjo	50
Kota Serang	45
Kota Tangerang	50
Kab. Gianyar	40
Kota Mataram	40
Kab. Lombok Timur	50
Kab. Alor	30
Kab. Flores timur	30
Kota Kupang	35
Kab. Mempawah	30
Kab. Melawi	30
Kota Pontianak	45
Kota Singkawang	30
Kota Palangkaraya	30
Kab. Kapuas	40
Kab. Barito Timur	25
Kab. Banjar	45
Kota Balikpapan	45
Kota Bontang	25
Kota Samarinda	45
Kota Tarakan	25
Kota Nunukan	25
Kota Manado	40
Kota Tomohon	20
Kab. Minahasa	35
Kota Palu	35
Kab. Poso	30
Kab. Bone	45
Kab. Sinjai	30
Kota Makassar	50
Kab. Boalemo	25
Kab. Mamuju	35
Kab. Buru	20
Kota Ambon	35
Kota Ternate	30
Kota Tidore Kepualuan	25

Kab. Marauke	30
Kab. Asmat	20
Kota Jayapura	40
Kab. Fakfak	20
Kab. Raja Ampat	20
Kota Sorong	30
Kab. Bangli	30
Kab. Landak	35
Kab. Seruyan	25
Kab. Tapin	25
Kab. Paser	30
Kab. Bitung	30
Kab. Kampar	45
Kab. Tebo	35
Kab. Karo	35
Kab. Bandar Lampung	45
Kab. Natuna	20
Kab. Labuhan Batu	45
Kab. Simalungun	50
Kab. Tobasamosir	30
Kab. Rokan Hilir	45
Kab. Klaten	50

LAMPIRAN 3

JUMLAH OPD

Kota/Kabupaten	Jumlah SKPD
Kota Banda Aceh	42
Kota Sabang	36
Kab. Aceh Jaya	41
Kab. Aceh Utara	63
Kab. Nias	43
Kota Medan	62
Kab. Solok	45
Kota Bukittinggi	32
Kota Padang	43
Kota Pekanbaru	44
Kab. Muaraenim	54
Kota Lubuklinggau	39
Kab. Lampung Utara	58
Kab. Bangka	51
Kota Pangkalpinang	37
Kota Batam	45
Kota Bandung	64
Kota Bekasi	50
Kota Bogor	37
Kota Depok	40
Kab. Garut	76
Kab. Cianjur	74
Kota Semarang	52
Kota Surakarta	30
Kota Magelang	46
Kota Tegal	64
Kab. Wonosobo	71
Kab. Boyolali	49
Kab. Purworejo	67
Kab. Brebes	52
Kab. Cilacap	54
Kota Salatiga	26
Kota Pekalongan	56
Kab. Bantul	46
Kab. Kulon Progo	44

Kab. Sleman	57
Kota Yogyakarta	43
Kab. Gresik	50
Kota Surabaya	74
Kota Malang	32
Kab. Sidoarjo	48
Kota Serang	34
Kota Tangerang	43
Kab. Gianyar	36
Kota Mataram	40
Kab. Lombok Timur	54
Kab. Alor	81
Kab. Flores timur	115
Kota Kupang	44
Kab. Mempawah	38
Kab. Melawi	40
Kota Pontianak	37
Kota Singkawang	32
Kota Palangkaraya	35
Kab. Kapuas	58
Kab. Barito Timur	24
Kab. Banjar	63
Kota Balikpapan	68
Kota Bontang	47
Kota Samarinda	46
Kota Tarakan	42
Kota Nunukan	51
Kota Manado	135
Kota Tomohon	57
Kab. Minahasa	34
Kota Palu	35
Kab. Poso	42
Kab. Bone	43
Kab. Sinjai	42
Kota Makassar	54
Kab. Boalemo	39
Kab. Mamuju	52
Kab. Buru	41
Kota Ambon	67
Kota Ternate	41
Kota Tidore Kepualuan	77

Kab. Marauke	38
Kab. Asmat	27
Kota Jayapura	44
Kab. Fakfak	55
Kab. Raja Ampat	65
Kota Sorong	37
Kab. Bangli	38
Kab. Landak	43
Kab. Seruyan	44
Kab. Tapin	38
Kab. Paser	33
Kab. Bitung	39
Kab. Kampar	58
Kab. Tebo	47
Kab. Karo	53
Kab. Bandar Lampung	57
Kab. Natuna	47
Kab. Labuhan Batu	40
Kab. Simalungun	101
Kab. Tobasamosir	48
Kab. Rokan Hilir	55
Kab. Klaten	56

LAMPIRAN 4

PENDIDIKAN TERAKHIR KEPALA DAERAH

Kota/Kabupaten	Pendidikan Terakhir
Kota Banda Aceh	3
Kota Sabang	1
Kab. Aceh Jaya	3
Kab. Aceh Utara	1
Kab. Nias	4
Kota Medan	4
Kab. Solok	3
Kota Bukittinggi	2
Kota Padang	2
Kota Pekanbaru	3
Kab. Muaraenim	3
Kota Lubuklinggau	4
Kab. Lampung Utara	3
Kab. Bangka	3
Kota Pangkalpinang	3
Kota Batam	3
Kota Bandung	3
Kota Bekasi	4
Kota Bogor	4
Kota Depok	3
Kab. Garut	3
Kab. Cianjur	4
Kota Semarang	3
Kota Surakarta	3
Kota Magelang	2
Kota Tegal	3
Kab. Wonosobo	3
Kab. Boyolali	3
Kab. Purworejo	3
Kab. Brebes	2
Kab. Cilacap	1
Kota Salatiga	3
Kota Pekalongan	2
Kab. Bantul	4
Kab. Kulon Progo	4

Kab. Sleman	4
Kota Yogyakarta	4
Kab. Gresik	4
Kota Surabaya	4
Kota Malang	4
Kab. Sidoarjo	3
Kota Serang	2
Kota Tangerang	3
Kab. Gianyar	3
Kota Mataram	1
Kab. Lombok Timur	4
Kab. Alor	3
Kab. Flores timur	2
Kota Kupang	4
Kab. Mempawah	4
Kab. Melawi	2
Kota Pontianak	3
Kota Singkawang	2
Kota Palangkaraya	2
Kab. Kapuas	3
Kab. Barito Timur	2
Kab. Banjar	1
Kota Balikpapan	2
Kota Bontang	4
Kota Samarinda	3
Kota Tarakan	4
Kota Nunukan	2
Kota Manado	4
Kota Tomohon	2
Kab. Minahasa	3
Kota Palu	3
Kab. Poso	1
Kab. Bone	3
Kab. Sinjai	2
Kota Makassar	4
Kab. Boalemo	2
Kab. Mamuju	3
Kab. Buru	3
Kota Ambon	2
Kota Ternate	4
Kota Tidore Kepualuan	1

Kab. Marauke	2
Kab. Asmat	2
Kota Jayapura	3
Kab. Fakfak	1
Kab. Raja Ampat	2
Kota Sorong	4
Kab. Bangli	3
Kab. Landak	3
Kab. Seruyan	3
Kab. Tapin	4
Kab. Paser	4
Kab. Bitung	2
Kab. Kampar	3
Kab. Tebo	3
Kab. Karo	2
Kab. Bandar Lampung	3
Kab. Natuna	3
Kab. Labuhan Batu	3
Kab. Simalungun	3
Kab. Tobasamosir	2
Kab. Rokan Hilir	1
Kab. Klaten	2

LAMPIRAN 5

LUAS WILAYAH

Kota/Kabupaten	luas
Kota Banda Aceh	61,36
Kota Sabang	153
Kab. Aceh Jaya	3812,99
Kab. Aceh Utara	3236,86
Kab. Nias	1842,51
Kota Medan	265,1
Kab. Solok	3738
Kota Bukittinggi	25,24
Kota Padang	693,66
Kota Pekanbaru	632,27
Kab. Muaraenim	7383,9
Kota Lubuklinggau	401,5
Kab. Lampung Utara	2715,87
Kab. Bangka	4050
Kota Pangkalpinang	89,4
Kota Batam	960,25
Kota Bandung	167,67
Kota Bekasi	206,61
Kota Bogor	118,5
Kota Depok	200,29
Kab. Garut	3074,07
Kab. Cianjur	3840,16
Kota Semarang	392
Kota Surakarta	44,03
Kota Magelang	1085
Kota Tegal	39,68
Kab. Wonosobo	984,68
Kab. Boyolali	1015
Kab. Purworejo	1034
Kab. Brebes	1902,37
Kab. Cilacap	2385
Kota Salatiga	56,781
Kota Pekalongan	45,25
Kab. Bantul	506,85
Kab. Kulon Progo	586,27

Kab. Sleman	574,82
Kota Yogyakarta	32,5
Kab. Gresik	1191,25
Kota Surabaya	350,54
Kota Malang	145,28
Kab. Sidoarjo	634,38
Kota Serang	266,71
Kota Tangerang	153,93
Kab. Gianyar	368
Kota Mataram	61,3
Kab. Lombok Timur	1230,76
Kab. Alor	2864,6
Kab. Flores timur	1813,2
Kota Kupang	26,18
Kab. Mempawah	2797,88
Kab. Melawi	10640,8
Kota Pontianak	107,8
Kota Singkawang	504
Kota Palangkaraya	2399,5
Kab. Kapuas	14999
Kab. Banjar	4688
Kota Balikpapan	527
Kota Bontang	406,7
Kota Samarinda	783
Kota Tarakan	250,8
Kota Nunukan	13841
Kota Manado	157,27
Kota Tomohon	114,2
Kab. Minahasa	1114,87
Kota Palu	395,06
Kab. Poso	7112,25
Kab. Bone	4559
Kab. Sinjai	819,96
Kota Makassar	175,77
Kab. Boalemo	2567
Kab. Mamuju	4999
Kab. Buru	5577
Kota Ambon	298,61
Kota Ternate	111,39
Kota Tidore Kepualuan	1645,73
Kab. Marauke	44071

Kab. Asmat	31983,69
Kota Jayapura	935,92
Kab. Fakfak	14320
Kab. Raja Ampat	8034,44
Kota Sorong	656,64
Kab. Bangli	490,71
Kab. Landak	9909
Kab. Seruyan	16404
Kab. Tapin	2700,82
Kab. Paser	7730,88
Kab. Bitung	304
Kab. Kampar	10928,2
Kab. Tebo	6461
Kab. Karo	2127,25
Kab. Bandar Lampung	296
Kab. Natuna	2009,85
Kab. Labuhan Batu	2562,1
Kab. Simalungun	4386,6
Kab. Tobasamosir	2021
Kab. Rokan Hilir	8881,59
Kab. Klaten	658,22

LAMPIRAN 6

TINGKAT PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Kota/Kabupaten	Item yang diungkapkan
Kota Banda Aceh	155
Kota Sabang	142
Kab. Aceh Jaya	140
Kab. Aceh Utara	139
Kab. Nias	140
Kota Medan	145
Kab. Solok	171
Kota Bukittinggi	156
Kota Padang	168
Kota Pekanbaru	154
Kab. Muaraenim	164
Kota Lubuklinggau	158
Kab. Lampung Utara	176
Kab. Bangka	158
Kota Pangkalpinang	167
Kota Batam	171
Kota Bandung	175
Kota Bekasi	160
Kota Bogor	150
Kota Depok	143
Kab. Garut	156
Kab. Cianjur	155
Kota Semarang	185
Kota Surakarta	180
Kota Magelang	174
Kota Tegal	182
Kab. Wonosobo	165
Kab. Boyolali	160
Kab. Purworejo	170
Kab. Brebes	160
Kab. Cilacap	150
Kota Salatiga	180
Kota Pekalongan	184

Kab. Bantul	174
Kab. Kulon Progo	169
Kab. Sleman	175
Kota Yogyakarta	170
Kab. Gresik	165
Kota Surabaya	175
Kota Malang	164
Kab. Sidoarjo	150
Kota Serang	165
Kota Tangerang	160
Kab. Gianyar	170
Kota Mataram	160
Kab. Lombok Timur	165
Kab. Alor	160
Kab. Flores timur	170
Kota Kupang	155
Kab. Mempawah	150
Kab. Melawi	160
Kota Pontianak	165
Kota Singkawang	171
Kota Palangkaraya	172
Kab. Kapuas	171
Kab. Banjar	170
Kota Balikpapan	169
Kota Bontang	172
Kota Samarinda	175
Kota Tarakan	174
Kota Nunukan	165
Kota Manado	163
Kota Tomohon	177
Kab. Minahasa	160
Kota Palu	164
Kab. Poso	168
Kab. Bone	161
Kab. Sinjai	169
Kota Makassar	167
Kab. Boalemo	159
Kab. Mamuju	163
Kab. Buru	159
Kota Ambon	162
Kota Ternate	164

Kota Tidore Kepualuan	166
Kab. Marauke	158
Kab. Asmat	169
Kota Jayapura	154
Kab. Fakfak	149
Kab. Raja Ampat	148
Kota Sorong	157
Kab. Bangli	161
Kab. Landak	155
Kab. Seruyan	160
Kab. Tapin	169
Kab. Paser	164
Kab. Bitung	182
Kab. Kampar	170
Kab. Tebo	162
Kab. Karo	166
Kab. Bandar Lampung	170
Kab. Natuna	176
Kab. Labuhan Batu	139
Kab. Simalungun	143
Kab. Tobasamosir	136
Kab. Rokan Hilir	164
Kab. Klaten	155

LAMPIRAN 7

UMUR ADMINISTRATIF PEMERINTAHAN DAERAH

Kota/Kabupaten	Umur Pemerintahan
Kota Banda Aceh	61
Kota Sabang	52
Kab. Aceh Jaya	15
Kab. Aceh Utara	72
Kab. Nias	72
Kota Medan	46
Kab. Solok	61
Kota Bukittinggi	70
Kota Padang	72
Kota Pekanbaru	71
Kab. Muaraenim	71
Kota Lubuklinggau	16
Kab. Lampung Utara	65
Kab. Bangka	67
Kota Pangkalpinang	59
Kota Batam	18
Kota Bandung	67
Kota Bekasi	35
Kota Bogor	67
Kota Depok	35
Kab. Garut	35
Kab. Cianjur	34
Kota Semarang	67
Kota Surakarta	67
Kota Magelang	67
Kota Tegal	31
Kab. Wonosobo	67
Kab. Boyolali	67
Kab. Purworejo	67
Kab. Brebes	67
Kab. Cilacap	67
Kota Salatiga	67
Kota Pekalongan	67

Kab. Bantul	67
Kab. Kulon Progo	67
Kab. Sleman	67
Kota Yogyakarta	67
Kab. Gresik	60
Kota Surabaya	67
Kota Malang	16
Kab. Sidoarjo	67
Kota Serang	10
Kota Tangerang	24
Kab. Gianyar	13
Kota Mataram	24
Kab. Lombok Timur	59
Kab. Alor	25
Kab. Flores timur	59
Kota Kupang	18
Kab. Mempawah	18
Kab. Melawi	13
Kota Pontianak	58
Kota Singkawang	16
Kota Palangkaraya	60
Kab. Kapuas	55
Kab. Banjar	54
Kota Balikpapan	58
Kota Bontang	18
Kota Samarinda	58
Kota Tarakan	20
Kota Nunukan	18
Kota Manado	66
Kota Tomohon	14
Kab. Minahasa	14
Kota Palu	39
Kab. Poso	58
Kab. Bone	66
Kab. Sinjai	58
Kota Makassar	67
Kab. Boalemo	17
Kab. Mamuju	58
Kab. Buru	18
Kota Ambon	59
Kota Ternate	18

Kota Tidore Kepualuan	14
Kab. Marauke	48
Kab. Asmat	14
Kota Jayapura	24
Kab. Fakfak	14
Kab. Raja Ampat	14
Kota Sorong	18
Kab. Bangli	61
Kab. Landak	18
Kab. Seruyan	15
Kab. Tapin	52
Kab. Paser	56
Kab. Bitung	27
Kab. Kampar	61
Kab. Tebo	18
Kab. Karo	23
Kab. Bandar Lampung	67
Kab. Natuna	18
Kab. Labuhan Batu	67
Kab. Simalungun	37
Kab. Tobasamosir	19
Kab. Rokan Hilir	18
Kab. Klaten	67

LAMPIRAN 8

JUMLAH PENDUDUK

Kota/Kabupaten	jumlah penduduk
Kota Banda Aceh	238814
Kota Sabang	40404
Kab. Aceh Jaya	86058
Kab. Aceh Utara	575895
Kab. Nias	136115
Kota Medan	2210624
Kab. Solok	375801
Kota Bukittinggi	115986
Kota Padang	883767
Kota Pekanbaru	886226
Kab. Muaraenim	567450
Kota Lubuklinggau	217119
Kab. Lampung Utara	885591
Kab. Bangka	309065
Kota Pangkalpinang	207420
Kota Batam	1062250
Kota Bandung	2404589
Kota Bekasi	2409083
Kota Bogor	1005012
Kota Depok	1809120
Kab. Garut	2210017
Kab. Cianjur	2246663
Kota Semarang	1815729
Kota Surakarta	557202
Kota Magelang	1219371
Kota Tegal	247212
Kab. Wonosobo	900653
Kab. Boyolali	930531
Kab. Purworejo	948000
Kab. Brebes	1792511
Kab. Cilacap	1888129
Kota Salatiga	183815
Kota Pekalongan	224063

Kab. Bantul	911503
Kab. Kulon Progo	470520
Kab. Sleman	1093110
Kota Yogyakarta	636660
Kab. Gresik	1251754
Kota Surabaya	2827892
Kota Malang	834545
Kab. Sidoarjo	1827064
Kota Serang	630320
Kota Tangerang	1651428
Kab. Gianyar	492757
Kota Mataram	419506
Kab. Lombok Timur	1289907
Kab. Alor	209974
Kab. Flores timur	280178
Kota Kupang	438005
Kab. Mempawah	301715
Kab. Melawi	228787
Kota Pontianak	655572
Kota Singkawang	232993
Kota Palangkaraya	258550
Kab. Kapuas	409862
Kab. Banjar	470160
Kota Balikpapan	619983
Kota Bontang	174292
Kota Samarinda	766015
Kota Tarakan	253026
Kota Nunukan	185449
Kota Manado	466176
Kota Tomohon	98013
Kab. Minahasa	336015
Kota Palu	363867
Kab. Poso	243025
Kab. Bone	717268
Kab. Sinjai	236497
Kota Makassar	1334090
Kab. Boalemo	145619
Kab. Mamuju	279393
Kab. Buru	132100
Kota Ambon	375760
Kota Ternate	215524

Kota Tidore Kepualuan	111431
Kab. Marauke	221886
Kab. Asmat	103074
Kota Jayapura	417492
Kab. Fakfak	84692
Kab. Raja Ampat	62861
Kota Sorong	275618
Kab. Bangli	264945
Kab. Landak	443265
Kab. Seruyan	180201
Kab. Tapin	164200
Kab. Paser	254503
Kab. Bitung	269396
Kab. Kampar	688204
Kab. Tebo	297735
Kab. Karo	389591
Kab. Bandar Lampung	1175397
Kab. Natuna	76192
Kab. Labuhan Batu	472215
Kab. Simalungun	8499405
Kab. Tobasamosir	180649
Kab. Rokan Hilir	504591
Kab. Klaten	1304519

LAMPIRAN 9

HASIL UJI DAN REGRESI

1. Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DPRD	97	3.00	3.91	3.5763	.27299
SKPD	97	3.26	4.39	3.8500	.24541
PENDIDIKAN	97	.00	1.39	.9717	.39618
PENDUDUK	97	10.61	15.96	13.0182	.99546
LUAS	97	3.23	10.69	6.8227	1.73792
UMUR	97	2.30	4.28	3.6324	.62966
PENGUNGKAPAN	97	.52	.70	.6171	.04088
Valid N (listwise)	97				

2. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		97
Normal Parameters[a,b]	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.03897876
Most Extreme Differences	Absolute	.068
	Positive	.042
	Negative	-.068
Test Statistic		.068
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200[c,d]

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

3. Uji Multikolinieritas

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.609	.075		8.081	.000		
	DPRD	.040	.026	.267	1.514	.134	.324	3.087
	SKPD	.008	.019	.046	.406	.686	.801	1.249
	PENDIDIKAN	.008	.011	.073	.675	.502	.860	1.163
	PENDUDUK	-.012	.007	-.297	-1.627	.107	.303	3.301
	LUAS	-.005	.003	-.214	-2.003	.048	.883	1.132
	UMUR	.006	.007	.091	.803	.424	.795	1.258

a. Dependent Variable: PENGUNGKAPAN

4. Uji Heteroskedastisitas

Scatterplot
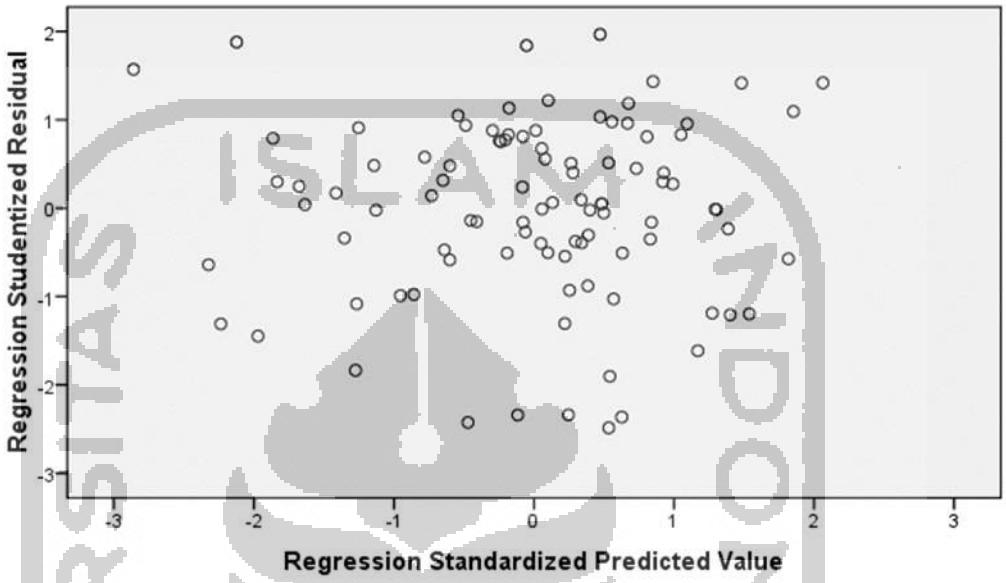
Dependent Variable: PENGUNGKAPAN